

**SISTEM PENILAIAN KINERJA FINANSIAL DAN SOSIAL BANK SYARIAH
PERSPEKTIF *MAQĀSID* AL-NAJJĀR**

DISERTASI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh
Luhur Prasetyo
NIM. F530315036

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Luhur Prasetyo

NIM : F53315036

Program : Doktor (S3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Luhur Prasetyo

PERSETUJUAN

Disertasi ini telah disetujui oleh Promotor

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.



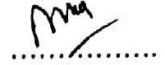



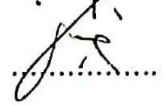
PROMOTOR



Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Disertasi Luhur Prasetyo ini telah diuji dalam tahap kedua (ujian terbuka) pada tanggal 28 Juni 2019, dengan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Ketua Penguji) 
2. Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, M.Ag. (Sekretaris/Penguji) 
3. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. (Promotor/Penguji) 
4. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Promotor/Penguji) 
5. Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM. (Penguji Utama) 
6. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA.LLM (Penguji) 
7. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Penguji) 

Surabaya, 9 Juli 2019

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 19600412 199403 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luhur Prasetyo
NIM : F53315036
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Program Doktor Ekonomi Syariah
E-mail address : elprasetyo@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid al-Najjar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2020

Penulis



(Luhur Prasetyo)

Bank syariah memiliki karakteristik dan fungsi yang unik dan berbeda dari bank konvensional. Bank syariah, di samping memiliki fungsi bisnis, juga memiliki fungsi sosial yang harus dijalankan. Oleh karena itu, evaluasi dan penilaian kinerja bank syariah juga harus dilakukan secara komprehensif sesuai dengan perannya, yaitu pencapaian kinerja bisnis (finansial) sekaligus kinerja sosialnya.² Namun sayangnya, penilaian kinerja sosial bank syariah belum mendapatkan perhatian yang memadai. Penilaian kinerja bank syariah selama ini lebih cenderung untuk menilai kinerja bisnis. Padahal kinerja bisnis dan kinerja sosial merupakan bagian integral yang berjalan beriringan, karena bank syariah didirikan dan dikembangkan dalam rangka memenuhi dua fungsi tersebut. Pemenuhan dua fungsi inilah yang juga menjadi karakteristik unik bank syariah, dibandingkan dengan bank konvensional.

Banyak peneliti telah mengkaji penilaian kinerja bank syariah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan standar penilaian kinerja finansial yang diadaptasi dan diduplikasi dari bank konvensional, seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*), RGEC (*Risk Profile, Good Corporate*

² Menurut Sucipto, kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara, kinerja sosial sering diistilahkan dengan *Corporate Social Performance (CSP)*. CSP merupakan kelanjutan dan pelaksanaan dari CSR. Kinerja sosial didefinisikan sebagai konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses respons sosial, dan hasil yang dapat diamati dari organisasi bisnis yang berkaitan dengan pemangku kepentingan dan hubungan sosialnya. Lihat Sucipto, *Penilaian Kinerja Keuangan* (Medan: FE Universitas Sumatera Utara, 2003), 34; Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR: Sejarah, Pengertian, dan Praksis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 51.

berorientasi pada laba (*profit oriented*), tetapi juga harus mencakup dimensi kinerja sosial bank syariah. Dua fungsi tersebut harus dilakukan secara berimbang.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, bank syariah tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemilik saham atau *shareholder*, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat di sekitarnya. Peningkatan kesejahteraan sosial, sesuai dengan tujuan keberadaan bank syariah, harus mendapatkan perhatian yang serius. Sudah banyak saat ini perusahaan yang bergeser dari paradigma *shareholder* (pemegang saham) menuju paradigma *stakeholder*.¹⁸

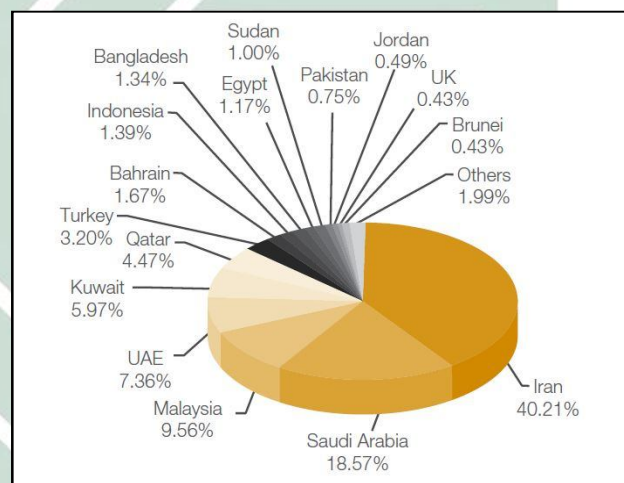
Teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang memang menekankan pada prinsip maksimalisasi laba perusahaan (*shareholder value*). Saat itu, kuat asumsi bahwa distribusi dana untuk kegiatan sosial perusahaan merupakan biaya yang mengurangi laba. Namun saat ini, prinsip tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (*stakeholder value*). Manfaat yang diperoleh perusahaan tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapi lebih menyebar pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi.

Paradigma *stakeholder value* pada bank syariah tersebut sejalan dengan teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertujuan agar

¹⁸ *Stakeholders* adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. *Stakeholders* perusahaan meliputi pemegang saham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau *supplier*), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. *Stakeholders* bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*. Lihat Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 131.

perkembangan aset pun, bank syariah di Indonesia masih tertinggal dari banyak negara lainnya. Menurut data yang dirilis dalam www.islamicfinance.com, *Shares of Global Islamic Banking Assets* bank syariah Indonesia hanya sebesar 1,39% dan berada pada posisi 9.²⁶ Dari sisi kinerja, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia juga tidak lebih unggul dibandingkan bank syariah di negara lain.²⁷

Gambar 1.1.
*Shares of Global Islamic Banking Assets*²⁸



Di Indonesia, regulasi terkait sistem penilaian kinerja bank syariah, sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan Metode CAMELS. Metode CAMELS adalah penilaian kinerja atau kesehatan bank syariah terhadap 6 faktor penilaian,

Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah,” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014).

²⁶ www.islamicfinance.com/2016/05/build-global-islamic-finance-centre/shares-of-global-islamic-banking-assets (21 November 2017).

²⁷ Thuba Jazil, et al., “The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks Based on The Maqāsid al-Sharī‘ah Approach,” *Ijtihad*, Vol. 7, No. 2 (2013); Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq, “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania,” *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1 (2012).

²⁸ www.islamicfinance.com/2016/05/build-global-islamic-finance-centre/shares-of-global-islamic-banking-assets (21 November 2017).

‘Āshūr (w. 1379 H/1973 M) yang berperan utama dalam mengembangkan konsep *maqāṣid* yang telah dibangun oleh al-Shāṭibī (w. 790 H).³⁷

Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan syari’ah (*maqāṣid al-sharī’ah*), al-Shāṭibī membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *ḍarūrīyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsīnīyāt*.³⁸ Selanjutnya, tingkatan *ḍarūrīyāt* memuat jenis-jenis proteksi yang menjadi unsur utama dalam *maqāṣid*, yaitu (1) menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*); (2) menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*); (3) menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*); (4) menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*); (5) menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).³⁹ Beberapa pakar usul fiqh menambahkan ‘menjaga kehormatan’ (*ḥifẓ al-‘ird*) di samping kelima pembagian yang sudah umum di atas.⁴⁰

Saat ini, perkembangan *maqāṣid al-sharī’ah* berada pada fase perkembangan metodologis. Fase ini dipelopori oleh hadirnya Ibn ‘Āshūr yang sangat fenomenal dan diposisikan sebagai pilar ketiga dalam peta perkembangan *maqāṣid al-sharī’ah*. Setelah itu, bermunculan beberapa tokoh *maqāṣid* kontemporer yang berupaya mengembangkan *maqāṣid al-sharī’ah* dari sebuah konsep menjadi sebuah pendekatan dalam menjawab problematika kontemporer. Namun, lima unsur utama *maqāṣid* yang telah

³⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178.

³⁸ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, vol. 2 (al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997), 17; ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kilānī, *Qawā’id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī: ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 164.

³⁹ Mayoritas ulama’ mengatakan bahwa urutan masalah adalah sebagaimana urutan di atas. Namun, ada juga yang mendahulukan *ḥifẓ al-nafs* dari pada *ḥifẓ al-dīn*. al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 20; al-Kilānī, *Qawā’id al-Maqāṣid*, 167; Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī’ah* (Cairo: Dār al-Kalimah, 2013), 13.

⁴⁰ Sebagian ulama’ memasukkan *ḥifẓ al-‘ird* menjadi urutan keenam. Namun, pendapat ini dibantah oleh ulama’ yang lain dengan argumentasi bahwa *ḥifẓ al-‘ird* sudah termasuk dalam kategori *ḥifẓ al-nasl*. al-Kilānī, *Qawā’id al-Maqāṣid*, 168; Jasser, *Maqāṣid*, 3.

dikembangkan oleh al-Ghazālī seakan menjadi harga mati yang tetap bertahan. Meskipun bukan berarti para tokoh *maqāṣid* pada fase ini tidak memiliki peran sama sekali. Kontribusi positif para tokoh *maqāṣid* pada fase ini adalah berupaya merelasikan lima unsur utama *maqāṣid* tersebut dengan isu-isu kontemporer. Jasser Auda, misalnya, memahami perlindungan terhadap keturunan menjadi kepedulian kepada keluarga. Selain itu, dia memahami perlindungan harta menjadi pengembangan ekonomi dan menekan gap antar kelas ekonomi.⁴¹

Sementara, ‘Abd al-Majīd al-Najjār,⁴² seorang ulama kelahiran Tunisia, menawarkan konsep *maqāṣid* dengan tawaran yang agak berbeda. Al-Najjār mengembangkan *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan berpijak pada bidang-bidang kehidupan manusia. Al-Najjār berupaya mendialogkan dan merelasikan teks dengan konteks kehidupan manusia. Dengan bertolak dari konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* yang telah berkembang sebelumnya dan mempertimbangkan persoalan yang berkembang dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, al-Najjār mengembangkan unsur-unsur penting dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*. Al-Najjār berpendapat bahwa syariah diturunkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi keniscayaan

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 248-249.

⁴² ‘Abd al-Majīd al-Najjār merupakan salah seorang pemikir Islam dan tokoh terkemuka di Tunisia. Selain itu, al-Najjār juga seorang politikus dari Partai Ennahdha Mouvement. Pada tahun 1985, al-Najjār meraih gelar profesor dan sejak saat itu dia mengajar di Universitas Zaitunah serta beberapa perguruan tinggi di Aljazair, Emirat Arab, Qatar, serta Maroko. Al-Najjār cukup produktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari tiga puluh karya akademis di berbagai bidang. Lihat ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab‘ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 294; <http://www.odabasham.net/> (1 Februari 2019).

3. Penilaian kinerja bank syariah tidak bisa dilepaskan dari praktik bank syariah sebagai sebuah realitas sosial. Dalam perspektif sosiologi agama, keberadaan bank syariah, sebagai sebuah realitas sosial, tidak bisa lepas dari agama. Bank syariah sebagai subsistem ekonomi Islam berpijak pada paradigma Islam. Namun, banyak penilaian kinerja bank syariah tidak bertolak dari landasan paradigmanya tersebut. Akibatnya, banyak penilaian kinerja bank syariah yang tidak selaras (*mismatch*) dengan landasan paradigmanya.
4. Tujuan universal bank syariah adalah merealisasikan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Namun, sistem penilaian kinerja bank syariah lebih berorientasi pada kinerja untuk meraih laba (*profit*), dan kurang memperhatikan penilaian kinerja sosial yang juga melekat pada bank syariah serta tujuan universal bank syariah tersebut (*maqāṣid al-sharī'ah*). Akibatnya, kemaslahatan umat yang menjadi tujuan syariah sering terabaikan dan tidak menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja bank syariah.
5. Al-Najjār telah mereformulasi dimensi *maqāṣid* menjadi lebih terperinci dan terurai dengan pendekatan yang bercorak antroposentris. Reformulasi dimensi *maqāṣid* oleh al-Najjār ini belum dikembangkan oleh para peneliti untuk menilai kinerja bank syariah. Memang ada beberapa penelitian yang telah mengembangkan formulasi penilaian bank syariah dalam perspektif *maqāṣid*. Namun beberapa penelitian tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah

penilaian bank konvensional sebagai tolok ukur. Padahal, karakteristik operasional bank syariah dan bank konvensional berbeda. Hasil penelitian ini bisa memberikan tawaran praktis-empirik untuk menilai kinerja bank syariah sesuai dengan karakteristiknya dan sesuai dengan *maqāṣid*.

F. Penelitian Terdahulu

Penilaian kinerja bank syariah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian manajemen kinerja perusahaan. Manajemen kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan visi organisasi dan menentukan arah organisasi. Kajian tentang penilaian kinerja bank syariah dengan berbagai metode penilaian telah banyak dilakukan. Begitu juga, kajian yang mengkomparasikan antara kinerja bank konvensional dan bank syariah juga cukup banyak. Sementara, kajian yang membuat formulasi model penilaian kinerja bank syariah masih belum banyak dilakukan.

Secara umum, kajian tentang penilaian kinerja bank syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan konvensional dan penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan syariah atau ekonomi Islam. Beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan konvensional kebanyakan menggunakan metode CAMELS, RGEC atau penilaian profitabilitas (*EVA/Economic Value Added*). Beberapa penelitian tersebut di antaranya tulisan Rosly & Abu Bakar, Usman & Khasif Khan, Rehana Kouser dan Irum Saba, Nada Lahrech, et al., Mukdad

menilai kinerja bank syariah dengan metode CAMEL.⁵⁰ Sementara, Metode RGEC merupakan metode yang dikembangkan di Indonesia oleh Bank Indonesia dan dilanjutkan oleh OJK dengan banyak menambahkan profil risiko dalam penilaian kinerja bank. Beberapa penelitian yang menilai kinerja bank dengan metode RGEC di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dan Queenindya Permata Faly, Desy Mayang Sari, serta Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti.⁵¹

Tabel 1.1.
Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan Pendekatan Konvensional

Peneliti (Tahun)	Metode Penilaian
Rosly dan Abu Bakar (2003)	Rasio Profitabilitas
Usman dan Khasif Khan (2012)	Rasio Profitabilitas dan Keuangan
Rehana Kouser dan Irum Saba (2012)	CAMEL
Nada Lahrech, et al. (2014)	CAMEL
Mukdad Ibrahim (2015)	CAMEL
Umiyati dan Queenindya Permata Faly (2015)	RGEC
Kamrul Ahsan (2016)	CAMEL
Desy Mayang Sari (2017)	RGEC
Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti (2018)	RGEC

⁵⁰ Rehana Kouser & Irum Saba, "Gauging the Financial Performance of Banking Sector Using CAMEL Model: Comparison of Conventional Bank, Mixed and Pure Islamic Bank in Pakistan," *International Research Journal of Finance and Economics*, Issues 82 (2012); Nada Lahrech, Abdelmounaim Lahrech, dan Youssef Boulaksil, "Transparency and Performance in Islamic Banking: Implications on Profit Distribution," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7, No. 1 (2014); Mukdad Ibrahim, "Measuring the Financial Performance of Islamic Banks," *Journal of Applied Finance and Banking*, Vol. 5, No. 3 (2015); Mohammad Kamrul Ahsan, "Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh," *Asian Business Review*, Vol. 6, No. 1, Issue 13 (2016).

⁵¹ Umiyati dan Queenindya Permata Faly, "Pengukuran Kinerja Bank Syariah dengan Metode RGEC," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2015); Desy Mayang Sari, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk Tahun 2014-2015," *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 4 (Mei 2017); Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2018).

mengembangkan variabel rumusan *Islamic performance index* untuk mengevaluasi alternatif *disclosure* dan kinerja bank syariah. Hameed, et al. mengambil *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) dan *Bahrain Islamic Bank* (BIB) sebagai sampel. Variabel rumusan tersebut dikembangkan dari *disclosure index*, *islamicity index* dan *financial index*. Hasil temuan dari penelitian Hameed, bahwa secara umum dua bank tersebut memiliki kinerja sosial yang rendah, namun Bank Bahrain dinilai lebih transparan dalam pengungkapan laporan keuangannya dibanding Bank Berhad.⁵³

Selanjutnya, Iwan Triyuwono menawarkan konsep ANGELS untuk menilai kinerja bank syariah. Konsep tersebut diformulasikan dari pemikiran filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit. Namun, formulasi ANGELS tersebut belum sampai pada tataran teknis-praktis. Dalam tulisannya, Triyuwono mengkritik terhadap dasar nilai etika utilitarianisme yang terkandung dalam sistem penilaian kesehatan bank konvensional (CAMELS), melalui dasar nilai etika syariah. Berdasarkan nilai etika syariah, tujuan filosofis bank syariah diformulasikan dengan struktur: proses, hasil, dan *stakeholders*. Selanjutnya, *breakdown* konsep tersebut dirumuskan dalam bentuk ANGELS: *Amanah Management*, *Non-economic Wealth*, *Give Out*, *Earnings*, *Capital and Assets*, *Liquidity and Sensitivity to Market*, dan *Socio-economic Wealth*. Sebagaimana diakui oleh Triyuwono dalam tulisannya,

⁵³ Shahul Hameed, Ade Wirna, Bakhtiar Ar Razi, M Nazli bin Mohamed Nor & Sigit Pramono, "Alternative Disclosure & Performance for Islamic Bank's," *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrn, Saudi Arabia, 2004.

penelitian bisnis. Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo, penelitian bisnis adalah proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan obyektif untuk membantu pembuatan keputusan-keputusan bisnis. Fakta dalam penelitian bisnis berkaitan dengan manusia dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.⁶³

Sementara, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan multidisipliner⁶⁴ dengan memadukan teori penilaian kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid*. Teori penilaian kinerja digunakan secara integratif bersama pendekatan *maqāṣid* untuk merumuskan sistem penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqāṣid*.

2. Sumber Data

Berdasarkan pertanyaan penelitian, objek material penelitian ini adalah sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah. Data tersebut dikumpulkan dan digali dari sumber data primer berupa buku-buku terkait sistem penilaian kinerja bank syariah, artikel atau hasil penelitian tentang penilaian kinerja bank syariah, serta regulasi tentang penilaian kinerja bank syariah. Sementara sumber data sekunder berasal

⁶³ Lingkup penelitian bisnis ada dua, yaitu penelitian manajemen dan penelitian akuntansi. Bidang penelitian manajemen antara lain bisnis umum, pemasaran, perilaku organisasi, manajemen operasi, manajemen SDM, dan lain-lainnya. Sementara, bidang penelitian akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan lain-lainnya. Lihat Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2016), 20-22.

⁶⁴ Menurut Khoirudin Nasution dan Kaelan, salah satu model kajian integratif-interkoneksi adalah kajian multidisipliner, yaitu interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing. Proses kerja sama dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam suatu disiplin ilmu. Lihat Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 19-20; Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 246-250.

Bab keempat dalam disertasi ini menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Pembahasan dimulai dengan analisis terhadap sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan analisis sistem penilaian kinerja bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār, untuk mendapatkan formula yang bisa digunakan untuk menilai kinerja bank syariah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah dan rekomendasi yang disarankan. Implikasi teoritik juga diulas dalam penutup untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian. Keterbatasan studi juga dijelaskan dalam bab ini, mengingat penelitian ini terbatas oleh hal-hal yang bersifat akademis maupun non akademis, dengan harapan bisa ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lanjutan.

Sedangkan kata *sharī'ah* secara etimologi berarti jalan ke air atau mata air. Kata *sharī'ah* juga berarti agama, jalan atau cara.⁴ Secara istilah, *sharī'ah* merupakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya melalui Nabi Muhammad SAW.⁵

Dalam penggunaannya, *maqāṣid al-sharī'ah* sering juga digunakan dengan istilah *maqāṣid al-shāri'* atau *al-maqāṣid al-shar'iyyah*. Tiga istilah tersebut sering digunakan oleh para ulama *maqāṣid*, meskipun yang paling populer digunakan adalah *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara terminologi, beberapa ulama kontemporer telah mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun, di kalangan ulama klasik belum ditemukan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang konkret. Bahkan, istilah *maqāṣid al-sharī'ah* belum digunakan sebagai istilah yang baku oleh para ulama' klasik.⁶ Hal ini bisa dimaklumi karena memang *maqāṣid al-sharī'ah* belum menjadi disiplin ilmu yang mandiri, namun masih menjadi sub bagian dari kajian ilmu *uṣūl*.

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus (al-Qur'an, 31: 32).

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ

Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah (al-Qur'an, 35: 32).

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

Di antara mereka ada golongan yang pertengahan (yang berlaku jujur dan tidak menyimpang dari kebenaran) (al-Qur'an, 5: 66).

⁴ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Vol. 8, 175; al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, 310; Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyyah* (Riyāḍ: Maktabah al-'Ubaykān, 2001), 14.

⁵ Muḥammad Sa'd bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'iyyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 31.

⁶ Muḥammad Shahīd, *Maqāṣid al-Sharī'ah: fī Ishkālīyyat al-Ta'rīf* (al-Ribāṭ: Muassasah Mu'minin, 2015), 6; Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 17; al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 34.

Para ulama klasik menjelaskan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dengan kata atau kalimat yang mengarah pada pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti *al-kulliyāt*, *maṣlahah*, hikmah, rahasia, atau 'illah terkait dengan hukum atau dalil.⁷ Sebagian ulama' berpendapat bahwa *maqāṣid* semakna dengan *maṣāliḥ*. Al-Juwaynī, misalnya, menggunakan istilah *maqāṣid* dan *maṣāliḥ* secara bergantian.⁸ Sementara, al-Ghazālī menggunakan istilah *maṣlahah* untuk menjelaskan tentang *maqāṣid al-sharī'ah*⁹ dan al-Āmidī menggunakan *al-maqṣūd min shar' al-ḥukm*.¹⁰

Secara terminologi, beberapa ulama telah mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

Menurut Ibn 'Ashūr, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع ، في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.

“makna atau hikmah yang bersumber dari Allah yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya dan bukan spesifik pada hukum tertentu.”¹¹

Dalam redaksi yang lain, *maqāṣid al-sharī'ah* menurut al-Fāṣī adalah:

⁷ al-Khādīmī, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah*, 15; ‘Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kilānī, *Qawā‘id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī: ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 48-54.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

⁹ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Vol. 2 (Lubnān: Dār al-Hudā, 1994), 481-482.

¹⁰ ‘Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. 3 (Riyād: Dār al-Ṣamī‘ī, 2003), 339.

¹¹ Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Urdun: Dār al-Nafāis, 2001), 251.

Sejarah perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* memang cukup lama dalam lintasan sejarah. Menurut al-Raysūnī,¹⁶ ada tiga tokoh sentral yang menjadi pilar perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu al-Juwaynī, al-Shāṭibī, dan Ibn 'Āshūr. Ketiga tokoh *maqāṣid* tersebut menjadi pilar penting bagi sejarah perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan peran dan kontribusi masing-masing.

Secara umum, peta historis perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* bisa dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase embrio, fase pertumbuhan, fase perkembangan, dan fase perkembangan metodologis.¹⁷ Masing-masing fase tersebut memberikan kontribusi dan peran yang berbeda dalam bangunan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah*. Masing-masing fase tersebut juga ditandai dengan kemunculan tokoh yang mendukung perkembangan ilmu *maqāṣid al-sharī'ah*.

Fase embrio menjadi perjalanan awal sejarah panjang *maqāṣid al-sharī'ah*. Fase ini dimulai dari masa sahabat sampai pra abad ke 3 H. Pada fase ini, benih-benih pemahaman *maqāṣidi* belum berupa ide atau konsep yang tertuang dalam sebuah tulisan. Namun benih-benih tersebut dapat dilacak dalam sejumlah peristiwa yang mengilustrasikan konsep awal *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ijtihad pengambilan keputusan hukum oleh

¹⁶ Aḥmad Al-Raysūnī, “al-Baḥṡ fi Maqāṣid al-Sharī'ah: Nash'atuhu wa Taṭawwuruḥu wa Mustaqbaluhu,” Makalah disampaikan dalam Seminar Maqāṣid al-Sharī'ah yang diselenggarakan oleh Yayasan al-Furqon di London tanggal 1-5 Maret 2005, 3.

¹⁷ Mayoritas kajian historis perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* fokus pada kajian tokoh. Sementara, beberapa studi yang mengkategorikan perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* berdasarkan masa perkembangan di antaranya dilakukan oleh Muḥammad Ḥusayn, Jasser Auda dan Ahmad Imam Mawardi. Lihat Muḥammad Ḥusayn, “al-Tanzīr al-Maqāṣidī 'inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Ashūr fi Kitābihi Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,” (Disertasi – Universitas Aljazair, Aljazair, 2005); Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*; Mawardi, *Fiqh Minoritas*.

terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu *Ithbāt al-'Ilal*.²¹ Walaupun karya al-Tirmīdhī tersebut belum menawarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, namun paling tidak al-Tirmīdhī al-Ḥakīm telah menuangkan karya awal tentang *maqāṣid al-sharī'ah* meskipun secara parsial.

Beberapa tokoh lain yang menghasilkan karya *maqāṣid al-sharī'ah* pada fase ini adalah Abū Zayd al-Balkhī (w. 322 H) dengan karyanya *al-Ibānah wa 'ilal al-Diyānah* serta Abū Bakr al-Qaffāl al-Shāshī (w. 365 H) dengan karyanya *al-Uṣūl* dan *Mas'alat al-Jawāb wa al-Dalā'il wa al-'Ilal*.²² Selain beberapa tokoh tersebut, tokoh lain yang juga cukup memberikan warna pada fase ini adalah al-'Āmirī (w. 381 H). Berbeda dengan kebanyakan ulama *maqāṣid* lainnya yang berlatar belakang ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh*, al-'Āmirī dikenal sebagai seorang filosof dan ahli ilmu kalam. Terkait dengan *maqāṣid*, al-'Āmirī memiliki karya berjudul *al-I'lām bi Manāqib al-Islām*. Al-'Āmirī menyatakan dalam karya tersebut bahwa dalam rangka membangun kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, ada lima pilar yang harus ditegakkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Lima pilar tersebut dikenal dengan lima *mazājir* (sanksi hukum), yaitu *mazjarah qatl al-nafs* (sanksi hukum untuk pembunuhan jiwa), *mazjarah akhdh al-māl* (sanksi hukum untuk pencurian harta), *mazjarah hatk al-satr* (sanksi hukum untuk membuka aib), *mazjarah thalb al-'ird* (sanksi hukum untuk pencelaan kehormatan), dan *mazjarah khal'*

²¹ Ahmad al-Raysuni, *al-Dharī'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2016), 50.

²² Ḥusayn, "al-Tanzīr al-Maqāṣidī," 95.

oleh al-Ṭūfī (w. 716 H), al-Subkī (w. 771 H) dan al-Shawkānī.²⁸ Namun menurut al-Raysūnī,²⁹ perlindungan terhadap kehormatan (*'ird*) dan *nasab* sudah termasuk dalam kategori perlindungan *nasl*.

Pada fase perkembangan ini, kajian tentang *maqāṣid al-sharī'ah* mendapatkan momentum pentingnya dengan munculnya tokoh utama yang dinilai sebagai pendiri ilmu *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu al-Shāṭibī.³⁰ Dua karya besar al-Shāṭibī tentang *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *al-I'tiṣām* dan *al-Muwāfaqāt*. Karya al-Shāṭibī tersebut tidak hanya menjabarkan tentang definisi dan konsep nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, namun karya tersebut juga meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam nalar berpikir *maqāṣid al-sharī'ah*. Al-Shāṭibī berhasil menawarkan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih dinamis dan aplikatif.

Jasser Auda mencatat ada tiga pilar substansial yang dikembangkan oleh al-Shāṭibī dalam mereformasi *maqāṣid al-sharī'ah*.³¹ Pertama, al-Shāṭibī meletakkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Apa yang dilakukan al-Shāṭibī tersebut telah menggeser posisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang semula berada pada ranah *maṣlaḥah mursalah*. Kedua, al-Shāṭibī merubah posisi *maqāṣid al-sharī'ah* dari hikmah di balik hukum menjadi dasar bagi hukum. Menurutnya, hukum parsial (*juz'iyah*) tidak bisa mengalahkan *maqāṣid al-sharī'ah* yang

²⁸ Imam Feisal Abdul Rauf, *Defining Islamic Statehood: Measuring and Indexing Contemporary Muslim States* (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 212.

²⁹ Al-Raysūnī, *Naẓariyyat*, 51.

³⁰ Al-Raysūnī, "al-Baḥṡh fi Maqāṣid al-Sharī'ah," 14.

³¹ 'Awda, *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalīl li al-Mubtadi'īn*, 53-54.

B. Perlindungan Harta dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Awal kajian perlindungan harta dalam *maqāṣid al-sharī'ah* sebenarnya telah dimulai oleh Ibn 'Āshūr. Salah satu kajian yang dibahas oleh Ibn 'Āshūr ketika mendiskusikan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* adalah *maqāṣid* terkait dengan transaksi harta. Menurut Ibn 'Āshūr, harta memiliki peran penting dalam kehidupan. Banyak *nuṣūṣ* syariah yang memberikan perhatian terhadap pentingnya harta dalam sistem kehidupan manusia.³⁵ Selanjutnya, Ibn 'Āshūr menjelaskan bahwa tujuan syariah (*al-maqṣad al-shar'ī*) yang harus dijaga dalam transaksi harta tercakup dalam lima unsur, yaitu sirkulasi harta (*al-rawāj*), kejelasan harta (*al-wuḍūḥ*), perlindungan harta (*al-hifz*), ketetapan harta (*al-thabāt*), dan keadilan (*al-'adl*).³⁶ Konsep *al-maqāṣid al-khāṣṣah* Ibn 'Āshūr terkait transaksi harta ini kemudian menjadi pijakan awal bagi *maqāṣidiyyun* berikutnya untuk mengembangkan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* terkait dengan transaksi harta.

Secara umum, prinsip dasar perlindungan harta dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi dua, yaitu dimensi perlindungan dari kerusakan harta (*jānib al-'adam*) dan dimensi perlindungan terhadap keberadaan/pelestarian harta (*jānib al-wujūd*).³⁷ Dimensi perlindungan dari kerusakan harta sejalan dengan prinsip *dar' al-mafṣadah*, sementara dimensi

³⁵ Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 450.

³⁶ *Ibid.*, 464.

³⁷ Ismā'īl Ḥabīb juga membagi perlindungan terhadap harta menjadi dua dimensi tersebut. Namun, dia tidak membuat penjabaran yang terinci kedua dimensi tersebut. Lihat Muhammad Bakr Ismā'īl Ḥabīb, *Maqāṣid al-Sharī'ah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan* (t.t.: Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmī, 1427 H), 332-333.

perlindungan terhadap keberadaan harta selaras dengan prinsip *jalb al-maṣlahah*.

Menurut ‘Abd al-Laṭīf dan ‘Abd al-Wadūd, dimensi perlindungan dari kerusakan harta dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* meliputi³⁸:

1. Menjauhkan harta dari bahaya (*ib‘ād al-ḍarar*). Yang dimaksud dengan menjauhkan harta dari bahaya adalah proteksi terhadap penggunaan harta yang tidak sesuai dengan syariah yang bisa berakibat pada timbulnya persengketaan dan permusuhan. Di antara contohnya adalah Islam memberikan perhatian dan mengatur transaksi harta yang dilakukan oleh orang idiot ataupun orang gila. Islam juga melarang seseorang untuk membeli sesuatu yang dibeli oleh saudaranya. Aturan dan ketentuan tersebut ditetapkan dalam Islam agar tidak terjadi sengketa atau pertikaian pasca terjadinya transaksi antar individu dengan lainnya.
2. Larangan penggunaan harta secara batil (*man‘ akl al-amwāl bi al-bāṭil*),³⁹ yaitu pendapatan atau distribusi harta tidak sesuai syara’. seperti melalui penipuan, riba, tadbis, suap, judi. Islam melarang memakan harta sesamanya dengan cara haram, seperti riba, judi, suap dan berbagai aktivitas sejenis yang bersifat manipulatif serta berbagai macam aktivitas yang mengarah kepada timbulnya permusuhan dan memakan uang sesama dengan cara batil.

³⁸ ‘Abd al-Laṭīf, “Maqāṣid al-Sharī‘ah,” 9; ‘Abd al-Wadūd Muṣṭafā Mursī al-Su‘ūdī, “Maqāṣid al-Sharī‘ah wa Taṭbīqātuha fi al-Mu‘āmalāt al-Maṣrafiyyah al-Mu‘āṣirah,” Makalah dipresentasikan dalam *International Conference on Islamic Banking & Finance: Cross Border Practices & Litigations* di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 15-16 Juni 2010, 7.

³⁹ Larangan ini berpijak pada peringatan yang terdapat dalam Surat al-Nisā’: 29 tentang larangan untuk memakan harta secara batil.

1. Kejelasan harta (*wuḍūḥ al-amwāl*), yaitu kejelasan posisi hak kepemilikan harta untuk menghindari persengketaan. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia saling melengkapi dan saling berinteraksi untuk memenuhi kehidupan hidup tersebut. Proses saling melengkapi dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut kemudian memunculkan transaksi dan pertukaran harta antar individu. Dalam Islam, transaksi tersebut dikenal dengan istilah akad. Islam menegaskan pentingnya perikatan dalam transaksi. Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi, agar tidak menimbulkan perselisihan. Pembahasan tentang akad banyak dikupas dalam berbagai referensi fikih ataupun ushul fikih. Ketentuan terkait dengan akad, mulai dari rukun, syarat, macam-macam akad, dan hal-hal lain yang terkait dengan akad dikupas panjang lebar oleh banyak ulama'. Dalam akad *mu'āmalah māliyyah*, syariat Islam memberlakukan ketentuan perikatan (*tawthīq*). Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan harta dan kepemilikan harta sangat penting dalam Islam.
2. Sirkulasi dan peredaran harta (*rawāj al-amwāl wa tadāwuluha*). Islam sangat menganjurkan harta beredar dan berputar secara meluas di seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang benar. Harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat, baik melalui konsumsi ataupun distribusi. Oleh karena itu, Islam melarang *iktināz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*iddle*) sehingga tidak berputar

dan beredar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat⁴³ serta *ihtikār*, yaitu menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga menimbulkan gejolak harga untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut tentu bertentangan dengan kaidah *supply* dan *demand* dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena dihambatnya ketersediaan barang di pasar.⁴⁴

3. Ketetapan harta (*thabāt al-amwāl*), terkait dengan kepemilikan harta dan kepastian hukum dengan posisi harta. Kepemilikan harta harus jelas dalam Islam melalui cara yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, hukum terkait sahnya suatu akad/transaksi dikaji secara mendalam dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, kerelaan kedua belah pihak dan kebebasan dalam berkontrak juga menjadi perhatian penting menurut Islam.
4. Keadilan dalam harta (*al-'adl fi al-amwāl*), keadilan distribusi serta larangan melakukan penipuan dan bertransaksi riba. Salah satu prinsip ekonomi dalam Islam terkait dengan harta adalah ekonomi dibangun berdasarkan nilai moral yang berlandaskan pada keadilan dalam distribusi harta. Adil berarti tidak ada yang mendzalimi orang lain dan tidak ada yang didzalimi.⁴⁵ Keadilan distribusi bukan berarti harus ada persamaan antara individu dengan individu lainnya, karena hal itu bertentangan

⁴³ Riyāḍ Maṣṣūr al-Khalīfī, "al-Maqāṣid al-Shar'īyah wa Atharuhā fi Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah," *Majallat Jāmi'ah al-Malik 'Abd al-'Azīz: al-Iqtisād al-Islāmī*, Vol. 17, No. 1 (2004), 34.

⁴⁴ Al-Qur'an menegaskan bahwa harta harus beredar dan bisa dinikmati oleh mayoritas masyarakat. Lihat al-Qur'an, 59: 7.

⁴⁵ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 354.

dengan kodrat manusia. Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Di antara prinsip keadilan yang diberlakukan dalam transaksi bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk mewujudkan distribusi harta yang adil, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan positif seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan distribusi harta lainnya. Sementara tindakan prohibitif seperti larangan riba, judi, penimbunan serta tindakan-tindakan terlarang lainnya.

C. *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam Pandangan ‘Abd al-Majīd al-Najjār

1. Biografi ‘Abd al-Majīd al-Najjār

‘Abd al-Majīd al-Najjār merupakan salah seorang pemikir Islam dan tokoh terkemuka di Tunisia. Ia lahir di Beni Khedach (Mednine), salah satu wilayah di Tunisia, pada 28 Mei 1945.⁴⁶ Al-Najjār pernah diusir keluar negaranya pada tahun 1989 karena terlibat gerakan Ennahdha Mouvement dan kemudian tinggal di Perancis.⁴⁷ Pendidikan akademis al-Najjār di perguruan tinggi dimulai ketika dia belajar di Universitas Zaitunah Tunisia, salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia Arab, dan mendapatkan gelar di bidang Ushuluddin pada tahun 1972. Minatnya yang

⁴⁶ Tunisia adalah negara di Afrika Utara yang pernah dijajah oleh Perancis. Mayoritas penduduk Tunisia beragama Islam Sunni. Negara Tunisia dipandang sebagai kiblat revolusi, demokrasi dan HAM di Timur Tengah. Lihat Zuhairi Misrawi, “Wajah Islam Progresif di Tunisia,” dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3788084/wajah-islam-progresif-di-tunisia> (28 Desember 2017). Secara geografis, Tunisia berada di ujung utara benua Afrika yang berhadapan dengan benua Eropa (wilayah selatan Italia) yang dipisahkan dengan Laut Mediterania. Dengan posisi ini, Tunisia terletak di persimpangan antara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Lihat <https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx> (28 Desember 2017).

⁴⁷ <http://www.odabasham.net/1-الذكتور-عبد-المجيد-النجار> (1 Februari 2019).

besar terhadap dunia akademis mendorong al-Najjār untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar dan meraih gelar magister di bidang Aqidah dan Filsafat di Fakultas Ushuluddin tahun 1974. Tidak puas dengan gelar magister, al-Najjār kemudian melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar dan meraih gelar doktor di Al-Azhar bidang Aqidah dan Filsafat pada tahun 1981.⁴⁸

Sejak tahun 1974, al-Najjār telah bergelut dan mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan. Pada tahun 1974-1985, dia bekerja sebagai pengajar di Suluk Ibtidai. Kemudian, pada tahun 1985, al-Najjār meraih gelar profesor dan sejak saat itu dia mengajar di Universitas Zaitunah serta beberapa perguruan tinggi di Aljazair, Emirat Arab, Qatar, serta Maroko.⁴⁹

Di samping sebagai seorang profesor, al-Najjār merupakan seorang ulama' sekaligus politikus. Dia aktif di dunia politik dan merupakan pelopor gerakan kebangkitan Tunisia. Pasca Revolusi Tunisia, al-Najjār berada di garda depan Gerakan Kebangkitan (Partai Ennahdha Mouvement) di daerah Mednine. Setelah berjuang pada jalur politik, pada Pemilu 23 Oktober 2011, al-Najjār berhasil terpilih menjadi anggota dewan dari Partai Ennahdha Mouvement.⁵⁰

⁴⁸ 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāsid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 294.

⁴⁹ <http://www.odabasham.net/1/تراجيم-2331-الدكتور-عبد-المجيد-النجار> (1 Februari 2019).

⁵⁰ https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_المجيد_النجار (28 Desember 2017); <https://media-plus-tn.com/السيرة- الذاتية-للدكتور-عبد-الحميد-الن> (28 Desember 2017). Partai Ennahdha Mouvement merupakan partai berhaluan Islam yang pada pemilu 2011 muncul sebagai partai pemenang dengan meraih 85 kursi di parlemen. Namun, pada pemilu 2014, Partai Ennahdha Mouvement gagal mempertahankan kemenangan dan akhirnya Nidaa Tounes yang beraliran sekuler mengambil alih kemenangan pemilu dengan meraih 86 kursi di parlemen. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_parliamentary_election,_2014 (19 Mei 2018).

Sebagai seorang akademisi, al-Najjār cukup produktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari tiga puluh karya akademis, di antaranya *Fī Fiqh al-Tadāyyun Fahman wa Tanzīlan*, *al-Imān bi Allah wa Atharuhu fī al-Ḥayāh*, *Dawr Ḥurriyyat al-Ra'y fī al-Wiḥdah al-Fikriyyah bayna al-Muslimīn*, *Khilāfat al-Insān bayna al-Wahy wa al-'Aql: Baḥth fī Jadaliyyat al-Naşṣ wa al-'Aql wa al-Wāqi'*, *Qaḍāyā al-Bī'ah min Manzūr Islāmī*, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, serta beberapa karya lainnya.⁵¹

2. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* al-Najjār

'Abd al-Majīd al-Najjār, seorang ulama' kelahiran Tunisia, mengembangkan *maqāṣid* dengan perspektif dan spektrum yang lebih luas dari ulama' sebelumnya. Al-Najjār menguraikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan berpijak pada dimensi kehidupan manusia. Al-Najjār berpendapat bahwa kehidupan manusia berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, ajaran agama Islam harus selalu bisa menjawab segala perkembangan tersebut, karena Islam selalu sesuai dengan dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia (*ṣāliḥ li kull zamān wa makān*). Menurut Al-Najjār, dimensi *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* yang lebih dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams*, terkadang sudah tidak sepenuhnya tepat untuk membaca berbagai dinamika aspek kehidupan manusia yang berkembang sangat cepat. Padahal, berbagai dinamika dalam kehidupan manusia tersebut

⁵¹ Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 294-295; <http://www.odabasham.net/>-الدكتور-عبد-المجيد-ترجم/٢٣٣١-٢٣٣١ (1 Februari 2019).

harus tercakup oleh *maqāṣid al-sharī'ah*.⁵² Oleh karena itu, selayaknya dan menjadi keniscayaan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* berkembang dan berorientasi secara general pada komprehensifitas dimensi kehidupan manusia.

Dengan menggunakan nalar berpikir yang bercorak epistemologi antroposentrisme,⁵³ al-Najjār menaruh perhatian pada upaya mengintegrasikan dan menginteraksikan prinsip-prinsip syariah dengan kondisi dan dimensi kehidupan manusia. Berdasarkan pada epistemologi antroposentrisme tersebut, al-Najjār berupaya mereformulasi dan mengembangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam mengembangkan dimensi *maqāṣid al-sharī'ah*, al-Najjar bertolak dari *islamic worldview*⁵⁴ bahwa salah satu peran dan tugas utama manusia hidup di dunia ini sebagai wakil Allah (*khalīfat Allah fi al-ard*).⁵⁵ Berdasarkan peran dan tugas tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan struktur alam semesta untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan dari syariat yang diturunkan oleh

⁵² Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 51.

⁵³ Aksin menyebut model seperti ini dengan epistemologi antroposentrisme Islam, yaitu epistemologi Islam yang berporos pada manusia. Epistemologi ini berupaya menemukan pesan humanis Islam. Lihat Aksin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 322.

⁵⁴ *Islamic worldview* adalah pandangan Islam terhadap kehidupan yang berimplikasi pada seluruh kegiatan kehidupan manusia di dunia. Beberapa tokoh Islam menggunakan istilah *islamic worldview* dengan istilah yang berbeda. Al-Mawdudi menggunakan istilah *Islāmī Nazariyat*, Atif al-Zayn menggunakan istilah *al-Mabda' al-Islāmī*, Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Taṣawwur al-Islāmī*, sementara Naquib al-Attas menggunakan istilah *Ru'yat al-Islām li al-wujūd*. Lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Islam dan Kapitalisme Barat," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 9, No. 1, (April 2013), 20.

⁵⁵ Al-Qur'an, al-Baqarah: 30.

banyak persoalan-persoalan masyarakat yang bermunculan tidak tercakup dalam *naṣṣ*. Oleh karena itulah, menjaga agama melalui ijtihad adalah sebuah keniscayaan. Dengan ijtihad, agama mampu menjawab dan memberikan solusi atas berbagai problematika kehidupan yang selalu berkembang (*ṣāliḥ li kull zamān wa makān*). Syariat Islam pun juga telah memerintahkan untuk berijtihad. Upaya ijtihad Mu'ādh bin Jabal adalah contoh kongkrit bahwa ijtihad itu harus dilakukan dan penting untuk dilakukan.

Ketiga, *tablīgh* (menyampaikan pesan ilahi kepada umat manusia). Artinya, agama dapat terjaga dan lestari jika prinsip-prinsip agama tersampaikan secara utuh kepada para pemeluknya. Dengan demikian, mereka tidak sekedar menjalankan rutinitas keagamaan semata, namun yang lebih penting lagi adalah pemeluk agama Islam memahami dengan penuh kesadaran ajaran agama Islam dan ajaran tersebut dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, salah satu faktor penunjang dalam menjaga agama adalah melalui penguasa. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang memegang peranan penting dalam menunjang kelestarian agama. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dari sisi mengalienasi faktor-faktor penghambat kelestarian agama, ada beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian dalam upaya tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-*

sharī'ah). Faktor pertama yang bisa menghambat kelestarian agama adalah hawa nafsu. Pengekangan dan pembatasan hawa nafsu sangat penting agar tidak menjadi liar dan brutal. Mayoritas penyebab penyimpangan manusia dalam berbagai aspek kehidupan berpangkal pada hawa nafsu yang dituruti tanpa kendali.⁶³ Menurut al-Shātibī, tujuan ditetapkan syariah adalah mengeluarkan *mukallaf* dari godaan hawa nafsu, sehingga tidak lalai melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah.⁶⁴

Faktor kedua adalah kediktatoran dan hegemoni pemikiran. Kebebasan berpikir merupakan prinsip dalam menerima nalar berpikir yang dibawa agama. Karena, ketika seseorang telah memahami prinsip nalar berpikir agama, niscaya keimanannya akan bertambah dan keyakinannya akan bertambah kuat. Oleh karena itu, hegemoni pemikiran perlu dilawan karena tidak sejalan dengan upaya menjaga agama. Apalagi kalau hegemoni pemikiran itu terkait fanatisme golongan ataupun taklid buta.⁶⁵

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam menjaga agama adalah penyimpangan ajaran dan merebaknya berita-berita palsu yang menyudutkan agama (*hoax*). Menjaga agama artinya menjaga agama dari penyimpangan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan. Terbukanya pintu ijtihad, di samping memiliki sisi positif, membuka lebar peluang masuknya pemikiran-pemikiran yang menyimpang.

⁶³ Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 73.

⁶⁴ Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt*, Vol. 2, 63.

⁶⁵ Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 75.

Keempat, menjaga kebebasan berkehendak.⁷⁴ Kebebasan berkehendak artinya suatu keadaan dimana seseorang bertindak tanpa ada paksaan atau kekangan dari orang lain. Keadaan tersebut memungkinkan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, baik dalam pemikiran, perkataan ataupun perbuatan. Islam mengakui adanya kebebasan individu. Namun, kebebasan tersebut bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Di samping itu, kebebasan individu juga terkait dengan masyarakat. Terkait dengan kebebasan dalam Islam, berikut prinsip-prinsip dasar yang melandasi kebebasan tersebut:

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu;
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah; dan
- 3) Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat

⁷⁴ Dalam kajian filsafat moral, Franz Magnis Suseno membedakan kebebasan manusia menjadi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang berada dalam diri manusia untuk menentukan dirinya sendiri yang bersifat positif. Kebebasan ini bukan menekankan pada “kebebasan dari” tapi “kebebasan untuk”. Sementara, kebebasan sosial adalah kebebasan yang diperoleh dari lingkungannya terkait dengan orang dan sifatnya terbatas. Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1987),23-29.

yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

2. Menjaga substansi manusia (*hifz al-dhāt al-insāniyyah*)

Agama hadir untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Manusia secara sosial (masyarakat) terdiri dari individu-individu yang berbeda-beda. Masyarakat bisa terjaga kemaslahatannya jika diawali dengan terjaganya kemaslahatan masing-masing individunya. Menjaga substansi manusia berarti menjaga dua unsur utama yang ada pada diri manusia, yaitu jiwa dan akal.⁷⁵

a. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs/self*)

Menurut al-Najjār,⁷⁶ menjaga jiwa memuat dua dimensi penting dalam diri manusia, yaitu menjaga jiwa secara materi dan menjaga jiwa secara maknawi. Jiwa memang bersifat immateri. Namun, menjaga jiwa bukanlah berarti hanya menjaga jiwa itu sendiri secara maknawi. Karena jiwa terwadahi dalam jasmani yang bersifat materi. Bagaimanapun juga, jasmani yang bersifat materi ini juga harus mendapatkan perhatian.

Menjaga jiwa secara materi artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjangnya secara materi, mulai dari nutrisi, serta kebutuhan jasmani lainnya dan menjauhkan segala hal yang membahayakan jasmani. Sementara, menjaga jiwa secara maknawi terwujud salah satunya melalui memberi rasa aman pada jiwa. Rasa

⁷⁵ Al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 111-112.

⁷⁶ *Ibid.*, 114-115.

keturunan sebagai generasi penerus.⁸¹ Bahkan, Islam menegaskan bahwa pertumbuhan dan keberlangsungan generasi penerus tersebut tidak hanya terkait pertumbuhan secara kuantitas. Namun pertumbuhan tersebut harus didasarkan juga pada kualitas generasi penerus. Oleh karena itu, segala hal yang mendorong pertumbuhan generasi penerus, baik secara kuantitas dan kualitas harus dijaga. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah jaminan nutrisi yang cukup serta pendidikan jiwa, akhlak dan nalar yang memadai.⁸²

Di samping itu, menjaga keturunan juga berarti menjaga kejelasan garis keturunan generasi manusia (garis nasab). Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hukum terkait pernikahan dan sangat melarang perzinahan. Bahkan, zina termasuk kategori dosa besar dalam Islam.⁸³

b. Menjaga struktur sosial masyarakat (*hifz al-kiyān al-ijtimā'ī/social entity*)

Manusia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah kalau tidak tergabung dalam struktur masyarakat.

Masyarakat terdiri dari struktur yang beraneka ragam. Menurut al-

⁸¹ Banyak negara saat ini yang menghadapi problem pertumbuhan penduduk (*population growth rate*) dengan minimnya jumlah kelahiran. Beberapa negara bahkan mengalami pertumbuhan penduduk negatif, karena angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran. Beberapa negara tersebut di antaranya adalah Rusia (-0,08%), Jerman (-0,16%), Jepang (-0,21%), Bulgaria (-0,61%), serta beberapa negara lainnya. Lihat Population Growth Rate dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html> (19 Mei 2018).

⁸² Al-Najjār, *Maqāsid al-Sharī'ah*, 146.

⁸³ *Ibid.*, 147.

sirkulasi harta yang menyangkut hak-hak individu dalam masyarakat. Hak-hak inilah yang menyediakan aturan dasar bagi karakter sebuah ekonomi dan selanjutnya menentukan cara distribusi atas pendapatan dan kekayaan. Konsepsi hak kepemilikan dan hak kebebasan sangat mendasar untuk menentukan pola distribusi. Sementara, redistribusi adalah pola sirkulasi harta yang berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga dan sosial.¹⁰¹ Dalam Islam, redistribusi harta kekayaan bisa bersifat imperatif, seperti zakat dan nadzar, bisa juga bersifat filantropis, seperti sedekah dan wakaf.

b. Menjaga lingkungan (*hiḥz al-bī'ah/environment*)¹⁰²

Lingkungan artinya adalah alam tempat manusia tinggal. Bumi dengan segala isinya adalah lingkungan. Begitu juga semesta yang melingkupi bumi tempat manusia tinggal merupakan lingkungan. Menjaga lingkungan sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Sebagai khalifah Allah, manusia memegang peranan penting

¹⁰¹ Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2012), 209-210. Menurut Zarqa dan Al-Jarhi, redistribusi harta kekayaan bertujuan untuk: (1) melawan kemiskinan, mengingat adanya ajaran penghormatan kepada anak Adam; (2) purifikasi bagi penderma.; dan (3) mereduksi ketidakadilan. Lihat Mabid Ali Al-Jarhi and Muhammad Anas Zarqa, "Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective," Makalah dipresentasikan dalam *Sixth International Conference on Islamic Economics and Finance* di Jakarta pada tanggal 21-24 Nopember 2005, 43.

¹⁰² Kepedulian al-Najjār terhadap lingkungan menggerakannya untuk menuangkan pokok pikirannya tentang lingkungan dan menghasilkan karya tentang ekologi yang berjudul *Qaḍāyā al-Bī'ah min Manzūr Islāmī*. Dalam karyanya tersebut, al-Najjār banyak mengupas tentang problematika ekologi kontemporer serta relasi antara manusia dan lingkungan. Lihat 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Qaḍāyā al-Bī'ah min Manzūr Islāmī* (Doha: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2004).

Kelestarian alam juga menjadi salah satu pilar utama dalam kajian tanggung jawab sosial organisasi yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di samping memperhatikan laba (*profit*) dan kesejahteraan manusia (*people*), organisasi atau perusahaan dewasa ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). Berdasarkan pada urgensi dan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan bagi manusia, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi salah satu isu pokok dalam ISO 26000 tentang standar pedoman tanggung jawab sosial institusi.¹⁰⁶

¹⁰⁶ ISO -suatu lembaga internasional dalam perumusan standar atau pedoman- mengaggas perlunya standar tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR standard*). Setelah melakukan diskusi panjang selama hampir 4 tahun tentang gagasan ini, akhirnya Dewan manajemen ISO menetapkan bahwa yang diperlukan adalah Standar Tanggungjawab Sosial atau *Social Responsibility Standard*. ISO 26000 adalah standar pedoman mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi. Menurut ISO 26000, ada tujuh isu pokok terkait dengan tanggung jawab sosial, yaitu: 1) Tata kelola organisasi (*Organizational Governance*); 2) Hak Asasi Manusia (HAM); 3) Ketenagakerjaan; 4) Lingkungan; 5) Praktik kegiatan institusi yang sehat; 6) Konsumen; dan 7) Pengembangan masyarakat. Lihat dalam www.iso.org (26 Juni 2018).

Sebagai sebuah subsistem ekonomi Islam, tujuan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu pencapaian kebahagiaan dalam horizon dunia maupun akhirat (*falāḥ*) melalui suatu tata kehidupan yang baik (*ḥayāh ṭayyibah*). Inilah kebahagiaan sejati yang diharapkan oleh setiap manusia. Bukan kebahagiaan semu yang sering kali justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan bagi pihak lain.

Bertolak dari tujuan akhir ekonomi Islam tersebut, dalam konteks aktivitas ekonomi, tujuan *falāḥ* tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa tujuan antara, yaitu (1) mewujudkan kemaslahatan umat; (2) merealisasikan keadilan dan pemerataan pendapatan; (3) membangun peradaban; dan (4) menciptakan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan.³¹

Sementara menurut Chapra, Islam adalah agama yang bersifat universal, sederhana, mudah dimengerti dan mudah dinalar. Ekonomi Islam yang berpijak pada *worldview* Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pilar dan landasan dalam segala aktivitasnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari (1) prinsip tauhid; (2) prinsip khilafah; dan (3) prinsip

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90; Darsono, et al., *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), 25-26.

bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah (*fee based*). Fungsi keempat adalah jasa sosial. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, baik melalui pinjaman kebajikan, zakat, atau dana sosial lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan keempat fungsi tersebut, di samping memainkan peran sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah juga harus memberikan kontribusi sosial bagi *stakeholder*.

Dalam konteks fungsi bank syariah, Dusuki pernah melakukan penelitian tentang tujuan perbankan syariah dalam perspektif *stakeholder*. Penelitian tersebut menghasilkan implikasi praktis bahwa lembaga keuangan syariah hendaknya tidak hanya berorientasi pada maksimisasi laba, namun lembaga keuangan syariah juga harus memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Di samping itu, dalam kompetisi global, bank syariah tidak bisa hanya mengandalkan pada kinerja finansial semata, namun bank syariah juga harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap para *stakeholder*.³⁹

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas nampak bahwa bank syariah memiliki fungsi ganda dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Fungsi pertama adalah bank syariah sebagai lembaga bisnis yang *profit oriented* dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Fungsi kedua adalah fungsi sosial bank syariah untuk memberikan kesejahteraan kepada

³⁹ Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2008), 145

yang serius. Sudah banyak saat ini perusahaan yang bergeser dari paradigma *shareholder* (pemegang saham) menuju paradigma *stakeholder*.⁴¹

Dalam teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang, keuntungan perusahaan memang menjadi fokus tujuan yang harus diraih oleh perusahaan (*shareholder value*). Dalam teori tersebut, distribusi dana untuk kegiatan sosial perusahaan merupakan biaya yang berakibat pada pengurangan laba. Namun dewasa ini, teori-teori ekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (*stakeholder value*). Kebijakan perusahaan tidak lagi difokuskan hanya pada maksimalisasi keuntungan untuk pemegang saham, akan tetapi aktivitas perusahaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara lebih luas oleh *stakeholders*.

Paradigma *stakeholder value* pada perusahaan tersebut sejalan dengan teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertujuan agar perusahaan tidak hanya memberikan manfaat untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lebih luas, seperti para karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, konsumen, serta lingkungan.⁴² CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan *Triple Bottom Lines* (3P), yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. Dengan prinsip 3P

⁴¹ *Stakeholders* adalah seseorang atau kelompok orang yang kena pengaruh langsung atau tidak langsung atau pada kegiatan bisnis perusahaan, atau yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung kegiatan bisnis perusahaan. *Stakeholders* perusahaan meliputi pemegang saham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau *supplier*), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. *Stakeholders* bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*. Lihat Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 131.

⁴² A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR* (Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009), 109-118.

- 3) Andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- 4) Dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama. Agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, maka:
 - a. Laporan keuangan disajikan dalam format yang sama.
 - b. Isi laporan keuangan adalah identik.
 - c. Prinsip-prinsip akuntansi yang dianut tidak berubah. Walaupun berubah maka dampak perubahan terhadap rugi-laba periode sekarang harus diungkapkan.
 - d. Perubahan dalam kondisi yang mendasari transaksi harus diungkapkan.

Laporan keuangan bank syariah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menyediakan informasi yang bermanfaat bagi

banyak pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Di antara pihak-pihak tersebut adalah 1) Pemilik dana; 2) Pihak yang memanfaatkan atau menerima dana; 3) Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah; 4) Pemegang saham; 5) Otoritas pengawasan; 6) Bank Indonesia; 7) Pemerintah; 8) Lembaga penjamin simpanan; dan 9) Masyarakat.⁷⁰

Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur melalui PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁷¹ Laporan keuangan bank syariah setidaknya disajikan secara tahunan. Laporan keuangan bank syariah terdiri dari 1) Neraca; 2) Laporan laba rugi; 3) Laporan arus kas; 4) Laporan perubahan ekuitas; 5) Laporan perubahan dana investasi terikat; 6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan 8) Catatan atas laporan keuangan.⁷²

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank syariah pada tanggal tertentu. Unsur-unsur neraca meliputi aset, kewajiban/liabilitas, serta ekuitas.⁷³

⁷⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 151-152; Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2008), 255-256.

⁷¹ PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami beberapa kali amandemen dan revisi. Lihat <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-syariah-101>.

⁷² Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003 (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003); Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia, 2009), 244; Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 30.

⁷³ Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, 78.

Corporate Governance pada bank syariah merupakan hal penting terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menjaga keinginan para *stakeholder*. Pada bank syariah, pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Di samping itu *good corporate governance* lebih menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi dan kontinuitas pengawasan. Hal ini penting karena berkontribusi untuk menjaga kepercayaan pasar dan menguatkan transparansi dan akuntabilitas.⁸¹

Laporan bidang manajemen bank syariah sering dikenal dengan laporan tata kelola bank syariah atau laporan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada industri perbankan syariah, *Good Corporate Governance* (GCG) harus berlandaskan pada lima prinsip dasar.⁸² Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan prinsip transparansi, pihak-pihak yang terkait dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan tertentu dibuat serta bagaimana bank syariah dikelola.

Kedua, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas

⁸¹ Irma Aulia R. Kasri dan Niki Lukviarman, "Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri," dalam *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (Jakarta: Kencana, 2009), 166.

⁸² Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI_71209.aspx (26 Juni 2018).

Setelah belasan tahun ketentuan tentang penilaian kesehatan bank syariah masih menyatu dengan bank konvensional, regulasi tentang penilaian kinerja bank syariah akhirnya diatur tersendiri pada tahun 2007 setelah Bank Indonesia (BI) menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007 dan dijabarkan melalui Surat Edaran BI Nomor 9/24/DPbS. Sistem penilaian kesehatan berdasarkan dua ketentuan tersebut menggunakan metode CAMELS.

PBI Nomor 9/1/PBI/2007 ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2007. Peraturan ini terdiri dari lima (5) bab dan dua puluh dua (22) pasal. Dalam ketentuan tersebut, faktor baru yang berbeda dan belum ada dalam penilaian sebelumnya adalah faktor *Sensitivity to Market Risk*. Penilaian faktor ini bertujuan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Di samping itu, indikator-indikator penilaian pada masing-masing faktor juga mengalami perkembangan dan lebih kompleks dibandingkan penilaian kesehatan bank yang terdapat pada ketentuan sebelumnya. Dalam metode CAMELS ini, masing-masing faktor terdiri dari beberapa indikator penilaian yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan.

Selanjutnya pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaiki sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah melalui Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014. Peraturan OJK ini terdiri dari

tingkat profitabilitas) dan *the adequacy of liquidity* (kecukupan likuiditas). Bank akan diranking dengan angka terendah adalah satu dan angka tertinggi adalah lima. Pada tahun 1996, ada penambahan komponen penilaian kinerja bank, yaitu *sensitivity to market risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar).⁹¹ Dengan penambahan ini, komponen penilaian kinerja bank menjadi enam dengan akronim CAMELS.

Di Indonesia, penilaian kinerja bank syariah sering dikenal dengan penilaian kesehatan bank syariah. Regulasi tentang kesehatan bank syariah di Indonesia telah ditetapkan beberapa kali. Pada tahun 2007, Bank Indonesia (BI) menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007. Sistem penilaian kesehatan tersebut menggunakan metode CAMELS.⁹²

Sesuai dengan PBI tersebut, tingkat kesehatan bank syariah merupakan hasil penilaian terhadap aspek-aspek yang memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Penilaian tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar

⁹¹Ron J. Feldman dan Jason Schmidt, "What are Camels and Who Should Know?," dalam <https://www.minneapolisfed.org/publications/fedgazette/what-are-camels-and-who-should-know> (31 Juli 2018).

⁹² Pemberlakuan penilaian kesehatan bank konvensional dengan Metode CAMELS lebih dulu dilakukan pada tahun 2004 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Meskipun faktor-faktor penilaian dalam Metode CAMELS yang digunakan untuk menilai bank syariah dan bank konvensional sama, namun indikator-indikator penilaiannya berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing bank.

serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Metode penilaian kesehatan bank syariah ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor *Capital* (permodalan), *Asset Quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas), dan *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar).⁹³

Penilaian terkait dengan faktor finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar. Rasio-rasio yang digunakan untuk menilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan. Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (*high impact*) terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamatan (*observed*) adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan (*judgement*).⁹⁴

Sementara, penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan.

⁹³ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁹⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/24/DPbS tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

bank dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

Kedua, proporsionalitas. Penilaian terhadap masing-masing indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Indikator penilaian tingkat kesehatan bank merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Ketiga, materialitas dan signifikansi. Bank harus mempertimbangkan materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

Keempat, komprehensif dan terstruktur. Proses penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis tersebut harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

adalah produk hijau (*green product*),¹³² status kehalalan produk, keamanan dan kualitas produk, serta tanggapan atas keluhan konsumen. Indikator *green product* tidak terkait dengan bank syariah. Indikator ini lebih terkait dengan perusahaan yang berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan akibat proses produksi ataupun limbah yang dihasilkan.

c. Karyawan (*Employees*)

Dalam ISR, karyawan merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi bisnis dan harus mendapatkan perhatian penuh. Dengan berpijak pada konsep etika amanah dan keadilan, karyawan-karyawan perusahaan harus diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi yang perlu diungkapkan berkaitan dengan karyawan, di antaranya gaji yang diperoleh, operasional kerja, pengembangan skill karyawan, kesetaraan kesempatan karir, jaminan kesehatan dan keselamatan, lingkungan kerja, serta fasilitas dan kesempatan melaksanakan ibadah.¹³³

d. Masyarakat (*Society*)

Tema ini didasari atas konsep dasar *ummah*, amanah, dan *'adl*. Dalam konsep tersebut, organisasi bisnis harus memberikan

¹³² *Green product* adalah barang atau produk yang dihasilkan aman dan tidak menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia serta ramah lingkungan hidup. Lihat Fabien Durif, et. al., "In Search of a Green Product Definition," *Innovative Marketing*, Vol. 6, Issue 1 (2010), 27.

¹³³ Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," 139-140; Othman dan Thani, "Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia," 138.

pula penelitian yang menganalisis penilaian kinerja finansial bank syariah secara komprehensif.

Di antara penilaian kinerja finansial bank syariah secara komprehensif yang banyak digunakan adalah sistem penilaian menggunakan CAMELS dan RGEC. Dua sistem penilaian tersebut pernah digunakan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, RGEC masih berlaku dalam regulasi penilaian kinerja bank syariah di Indonesia. CAMELS berlaku sejak tahun 2007 dan kemudian digantikan oleh RGEC sejak tahun 2014 yang berlaku hingga sekarang. Di samping dua sistem penilaian tersebut, Iwan Triyuwono juga menawarkan konsep penilaian kinerja bank syariah dengan metode ANGELS. Berbeda dengan metode CAMELS dan RGEC, penilaian kinerja bank syariah dengan metode ANGELS tidak hanya terkait dengan kinerja finansial tetapi juga terkait dengan kinerja sosial.

Sistem penilaian kinerja bank dengan menggunakan CAMELS banyak digunakan oleh para peneliti dan beberapa negara dalam menilai kinerja perbankan. CAMELS adalah sebuah akronim penilaian kinerja bank berdasarkan faktor *Capital* (permodalan), *Assets quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (profitabilitas), *Liquidity* (likuiditas), dan *Sensitivity to market risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar). Pada awal pengembangannya, *sensitivity to market risk* belum termasuk dalam faktor penilaian. Sehingga di awal perkembangannya, faktor penilaian kinerja bank menggunakan CAMEL.

Metode CAMELS sebagai metode penilaian kinerja bank pertama kali digunakan oleh Uniform Financial Institution Rating System (UFIRS) pada tahun 1979. Dengan menggunakan metode penilaian dengan CAMEL, UFIRS menilai performa bank pada lima komponen, yaitu *the adequacy of capital* (kecukupan modal), *the quality of assets* (kualitas aset), *the capability of management* (kemampuan manajemen), *the quality and level of earning* (kualitas dan tingkat profitabilitas) dan *the adequacy of liquidity* (kecukupan likuiditas). Bank akan diranking dengan angka terendah adalah satu dan angka tertinggi adalah lima.

Pada tahun 1996, ada penambahan komponen penilaian kinerja bank, yaitu *sensitivity to market risk* (sensitifitas terhadap risiko pasar). Dengan penambahan ini, komponen penilaian kinerja bank menjadi enam dengan akronim CAMELS. Seiring dengan pertumbuhan bank syariah, metode CAMELS juga diadopsi untuk menilai kinerja bank syariah. Namun, beberapa adaptasi sesuai dengan karakteristik bank syariah dilakukan dalam penerapan penilaian CAMELS pada bank syariah, sehingga rasio penilaian yang digunakan pada bank syariah tidak sepenuhnya sama dengan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja bank konvensional.

Dibandingkan dengan sistem penilaian kinerja bank syariah lainnya, metode CAMELS relatif paling mapan karena telah lama digunakan dan berbagai perbaikan melalui kajian dan studi akademis telah dilakukan. Dalam metode CAMELS, tidak semua faktor penilaian terkait dengan penilaian kinerja finansial. Ada satu faktor penilaian yang tidak menilai kinerja

finansial, yaitu *Management*. Sehingga, ada lima faktor saja yang terkait dengan penilaian kinerja finansial bank syariah. Kelima faktor tersebut adalah CAELS (*Capital, Assets, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*).

Di Indonesia, regulasi pemberlakuan CAMELS berlaku sejak tahun 2007 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007. Namun, sejak tahun 2014 penilaian kinerja bank syariah menggunakan regulasi baru melalui Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014. Dalam peraturan OJK tersebut, penilaian kinerja bank syariah menggunakan metode RGEC yang terdiri dari empat faktor penilaian meliputi *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital*.

Dari empat faktor dalam metode RGEC, penilaian kinerja finansial bank syariah terdapat pada tiga faktor, yaitu *Risk Profile, Earnings* dan *Capital*. Sementara, *Good Corporate Governance* terkait dengan tata kelola atau manajemen bank syariah. Dalam metode RGEC, ada beberapa faktor yang berbeda dari metode CAMELS. Faktor tersebut adalah *Assets Quality, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*. Dalam metode CAMELS, tiga faktor tersebut menjadi faktor utama dalam penilaian kinerja bank syariah. Dalam metode RGEC, tiga faktor tersebut sebenarnya tidak dihilangkan. Tiga faktor tersebut dalam metode RGEC termasuk dalam faktor *Risk Profile*, karena terkait dengan risiko yang dihadapi oleh bank syariah.

Sementara, Iwan Triyuwono menawarkan sistem penilaian kinerja bank syariah yang lain dengan metode ANGELS. Meskipun tidak semua faktor penilaian dalam ANGELS terkait dengan kinerja finansial, namun ada

dua faktor yang berkaitan dengan penilaian kinerja finansial bank syariah. Dua faktor tersebut adalah faktor “E” (*Earnings, Capital and Assets*) dan faktor “L” (*Liquidity and Sensitivity to Market*). Dua faktor tersebut sebenarnya sama dengan faktor-faktor yang ada di dalam CAMELS. Hanya saja, Triyuwono meringkas lima faktor yang ada di dalam CAMELS menjadi dua faktor saja.

Dari tiga metode penilaian kinerja finansial, yaitu CAMELS, RGEC, dan ANGELS, semuanya sepakat bahwa faktor-faktor penilaian kinerja finansial yang ada di dalam CAMELS tetap penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja bank syariah. Faktor-faktor yang disepakati dan masih digunakan dalam semua metode tersebut adalah faktor-faktor *Capital, Assets Quality, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*. Hanya saja, ada beberapa pengembangan faktor dan indikator dalam RGEC dan ANGELS.

Dalam Metode RGEC, nilai beda dari Metode CAMELS dalam penilaian kinerja finansial bank syariah adalah faktor profil risiko yang harus dinilai. Salah satu prinsip Metode RGEC adalah lebih berorientasi risiko dibandingkan CAMELS. Sesuai dengan prinsip tersebut, penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus memperhatikan risiko-risiko bank yang bisa berdampak pada kinerja bank syariah secara keseluruhan. Risiko-risiko yang wajib dinilai dalam Metode RGEC meliputi sepuluh jenis risiko bank syariah, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

Metode CAMELS konvensional saja. Seharusnya, Triuwono juga memberikan komentar terhadap Metode CAMELS pada bank syariah, karena konsep ANGELS yang ditawarkan oleh Triuwono baru dipublikasikan pada tahun 2011 setelah PBI penilaian kesehatan bank syariah ditetapkan.

Harta memiliki peran penting dalam sistem kehidupan manusia. Dalam perspektif *maqāṣid*, bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan tugas utama sebagai pengelola harta masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan harta untuk kemaslahatan umat, yaitu perlindungan dari kerusakan harta dan perlindungan terhadap keberadaan/pelestarian harta. Dimensi perlindungan dari kerusakan harta sejalan dengan prinsip *dar' al-mafṣadah*, sementara dimensi perlindungan terhadap keberadaan harta selaras dengan prinsip *jalb al-maṣlahah*.

Kinerja finansial bank syariah adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu untuk mengukur keberhasilan bank syariah dalam menghasilkan laba. Dalam *stakeholders theory*, kinerja finansial terkait dengan kepentingan pihak internal, yaitu pemilik atau pemegang saham, manajer serta karyawan. Dengan mengintegrasikan *stakeholders theory* dan konsep *maqāṣid*, kinerja finansial bank syariah harus memperhatikan perlindungan harta dan perlindungan kemaslahatan pihak internal bank syariah, yaitu pemilik, manajer serta karyawan bank syariah.

B. Sistem Penilaian Kinerja Sosial Bank Syariah

Tanggung jawab manajemen adalah meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Komponen *stakeholders*, seperti investor, kreditor, dan karyawan

sangat memperhatikan kinerja. Kinerja keuangan lebih tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkatkan aset *stakeholders*. Di samping itu, peningkatan kinerja keuangan membuat perusahaan mempunyai banyak kesempatan untuk meningkatkan kinerja sosial dalam semua aspek.

Setiap perusahaan harus meningkatkan secara sinergis tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan untuk memenuhi harapan *stakeholders*. Sebuah pertanyaan memang sering muncul, manakah di antara kinerja sosial perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan yang didahulukan. Waddock dan Graves menjawab pertanyaan tersebut melalui dua teori,² yaitu *slack resource theory* dan *good management theory*. *Slack resource theory* menyatakan bahwa perusahaan harus mempunyai kinerja keuangan yang baik untuk bisa memberikan kontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kinerja sosial dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dana. Dan dukungan tersebut tidak akan bisa maksimal jika kinerja keuangan tidak baik. Sementara, *good management theory* menegaskan bahwa CSR akan membuat perusahaan mendapat reputasi baik dari *stakeholders*. Hal itu tentu akan membuat perusahaan lebih mudah untuk meningkatkan kinerja keuangan, karena mendapatkan dukungan dari *stakeholders*. Oleh karena itu, menurut teori ini, kinerja sosial perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu agar memberikan efek positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.³ Artinya, dalam perspektif dua teori tersebut, kinerja keuangan dan kinerja sosial

² Sandra A. Waddock dan Samuel B. Graves, "The Corporate Social Performance-Financial Performance Link," *Strategic Management Journal*, Vol. 18, No. 4 (April 1997), 306-307.

³ Hasan Fauzi dan Kamil M. Idris, "The Relationship of CSR and Financial Performance: New Evidence from Indonesian Companies," *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2009), 68-69.

jika manajemen dan karyawan mempunyai komitmen yang sama terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran banyak perusahaan terhadap pentingnya CSR dan semakin diterima oleh berbagai pihak, penilaian terhadap kinerja sosial perusahaan juga berkembang. Beberapa peneliti telah mengembangkan sistem penilaian kinerja sosial perusahaan (CSP). Namun, konsep CSR yang cukup variatif memang berakibat pada sistem penilaian kinerja sosial (CSP) yang bervariasi juga. Terkait dengan bank syariah, sampai saat ini belum ada peneliti yang secara spesifik mengembangkan penilaian kinerja sosial bank syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengadaptasi konsep CSP yang dikembangkan untuk penilaian perusahaan secara umum. Di antara konsep CSP yang diadaptasi tersebut adalah penilaian kinerja bank syariah menggunakan *Islamic Social Reporting (ISR) Index*. Selain itu, ada juga sistem penilaian kinerja sosial bank syariah yang terintegrasi dengan penilaian kinerja finansial bank syariah, seperti model ANGELS yang dikembangkan oleh Triyuwono dan beberapa peneliti lainnya.

Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan digagas oleh Roszaini Haniffa pada tahun 2002 dan selanjutnya dikembangkan oleh Rohana Othman, et. al. pada tahun 2009 dan 2010. Konsep ISR muncul sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada Allah dan masyarakat. Di samping itu, ISR juga merefleksikan transparansi kegiatan bisnis perusahaan melalui penyajian informasi yang relevan sesuai dengan tanggung jawab

sosial perusahaan. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan dengan pendekatan syariah. Indeks ini dikembangkan secara integratif berdasarkan pada standar pelaporan yang ditetapkan oleh AAOIFI dan prinsip syariah. Beberapa peneliti kemudian mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut.

Haniffa, sebagai penggagas awal ISR, merumuskan Indeks ISR meliputi lima tema pengungkapan, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*), Tema Produk dan Jasa (*Product*), Tema Karyawan (*Employees*), Tema Masyarakat (*Society*), dan Tema Lingkungan (*Environment*). Dari lima tema tersebut, Othman, et. al. menambahkan satu tema pengungkapan, yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).

Sementara Triyuwono menawarkan konsep ANGELS untuk menilai kinerja bank syariah. Konsep tersebut diformulasikan oleh Triyuwono dari pemikiran filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit. Namun, konsep tersebut belum sampai pada tataran teknis. Pihak-pihak yang ingin menilai kinerja bank syariah menggunakan konsep ANGELS tersebut tentu saja harus mengembangkan indikator penilaian dulu sampai pada tataran teknis. Sistem ANGELS merupakan singkatan dari *Amanah Management, Non-economic Wealth, Give Out, Earnings, Capital and Assets, Liquidity and Sensitivity to Market*, dan *Socio-Economic Wealth*. Masing-masing faktor dari ANGELS tersebut merupakan bagian dari “proses”, “hasil”, dan “stakeholders”.

Dari enam faktor yang terdapat dalam ANGELS, beberapa di antaranya terkait dengan kinerja finansial bank syariah dan sebagian yang lain terkait dengan kinerja sosial bank syariah. Triyuwono memang tidak memisahkan secara tegas dua macam kinerja tersebut dan memang fokus konsep tersebut adalah nilai etika syariah yang melandasinya. Namun kalau dipetakan dari sisi kinerja sosial bank syariah, penilaian kinerja sosial bank syariah terdapat dalam empat faktor, yaitu *Amanah Management*, *Non-economic Wealth*, *Give Out*, dan *Socio-Economic Wealth*.

Dalam faktor *Amanah Management*, dimensi sosial yang ditawarkan oleh Triyuwono adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam *Amanah Management* meliputi tiga macam, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, akuntabilitas terhadap *stakeholders*, dan akuntabilitas terhadap alam. Wujud fundamental dari ketiga akuntabilitas tersebut terletak pada bisnis perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan syariah.

Sementara dalam faktor *Non-economic Wealth*, faktor ini menjadi faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi faktor pembeda dengan penilaian bank syariah lain yang tidak berdasarkan pada etika syariah. *Non-economic Wealth*, dalam konsep Triyuwono, terdiri dari kesejahteraan mental dan kesejahteraan spiritual. Faktor ini memang bersifat abstrak, oleh karena itu diperlukan daya “akal” mental dan spiritual yang kuat dari manajemen bank syariah. Kesejahteraan ini merupakan salah satu “hasil” dari “proses” praktik *amanah management*.

Faktor lain yang memuat dimensi sosial adalah *give out*, yaitu distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan bank syariah. Menurut Triyuwono, etika syariah tidak menghendaki kekayaan (kesejahteraan) hanya beredar pada golongan tertentu saja. Kekayaan harus beredar dan dinikmati oleh banyak lapisan masyarakat agar tercipta pemerataan kesejahteraan dan meminimalkan kesenjangan.

Kesejahteraan dalam perspektif syariah harus didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konsep ANGELS, pihak yang menerima adalah pihak yang lebih luas dibandingkan dengan konvensional, yaitu *direct participant*, *indirect participant*, dan alam. Dengan distribusi yang lebih luas ini, bank syariah diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effects* yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan distribusi kepada *shareholders* saja.

Faktor terakhir yang memuat dimensi sosial adalah *socio-economic wealth*. Faktor keenam ini terkait dengan kesejahteraan materi yang tidak bersifat ekonomi semata, tetapi juga bersifat sosial. Contoh konkrit dari faktor keenam ini adalah dana infaq, zakat, dan shadaqah serta pendistribusiannya dalam bentuk qardul hasan kepada *indirect participant*.

Dari dua sistem penilaian kinerja sosial bank syariah tersebut, ISR dan ANGELS, terdapat beberapa titik persamaan antara keduanya, meskipun masing-masing mengungkapkannya dengan terma yang berbeda. Titik persamaan tersebut adalah pentingnya penilaian kinerja sosial bank syariah berdasarkan tiga relasi bank syariah, yaitu relasi bank syariah dengan Tuhan,

relasi bank syariah dengan *stakeholders*, dan relasi bank syariah dengan alam. Tiga relasi tersebut menjadi poin penting wujud akuntabilitas sosial bank syariah yang harus dinilai.

Relasi yang pertama adalah akuntabilitas bank syariah terhadap Tuhan. Dalam ISR maupun ANGELS, refleksi akuntabilitas bank syariah terhadap Tuhan adalah praktik bank syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan bukan sekedar pada simbol-simbol syariah. Refleksi kesesuaian praktik bank syariah dengan ketentuan syariah tersebut wujud fundamentalnya bisa dilihat melalui status *shariah compliance* bank syariah. Dalam ISR, status *shariah compliance* termasuk dalam Tema Tata Kelola Perusahaan. Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas terhadap Tuhan tercakup di dalam Faktor *Amanah Management*.

Relasi kedua adalah akuntabilitas bank syariah terhadap *stakeholders*. Dalam ISR, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap *stakeholders* terdapat dalam semua Tema ISR, selain Tema Lingkungan. Tema-tema tersebut adalah Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*), Tema Produk dan Jasa (*Product*), Tema Karyawan (*Employees*), Tema Masyarakat (*Society*), dan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap *stakeholders* terdapat dalam empat faktor, yaitu *Amanah Management*, *Non-economic Wealth*, *Give Out*, dan *Socio-Economic Wealth*

Selanjutnya, relasi ketiga adalah akuntabilitas sosial bank syariah terhadap alam. Dalam ISR, akuntabilitas terhadap alam secara eksplisit

terdapat dalam tema tersendiri, yaitu Tema Lingkungan. Sementara dalam ANGELS, akuntabilitas sosial bank syariah terhadap alam terdapat dalam Faktor *Amanah Management* dan Faktor *Give Out*. Dalam ANGELS, proses *Amanah Management* harus memperhatikan alam (*nature*) dan hasil kesejahteraan (*Give Out*) yang diperoleh harus didistribusikan salah satunya untuk pelestarian dan pemeliharaan alam.

Selain poin relasi dengan Tuhan, titik singgung tersebut ternyata juga selaras dengan konsep CSR yang bertujuan agar perusahaan tidak hanya menjalankan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti para karyawan, komunitas masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan.⁵ CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan *Triple Bottom Lines (3P)*, yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. Dengan prinsip 3P ini, tujuan bisnis tidak lagi semata mencari *profit* (laba), tetapi juga harus memberikan kesejahteraan bagi manusia (*people*) dan menjamin sustainability kehidupan dunia ini (*planet*).⁶

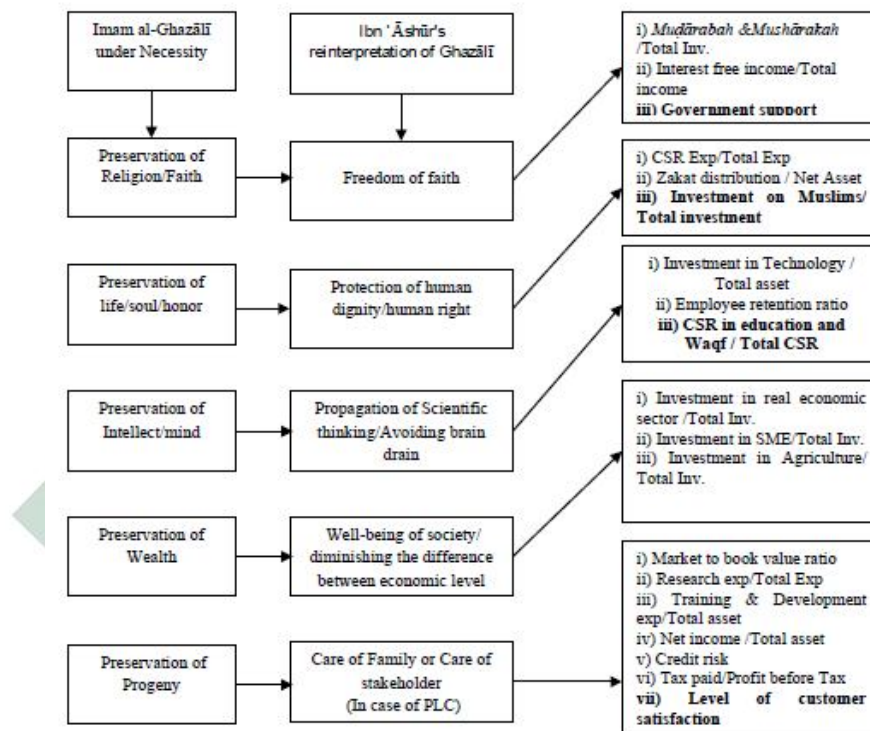
Dalam perspektif *maqāṣid*, kinerja sosial bank syariah sangat terkait dengan perlindungan seluruh unsur-unsur *maqāṣid*. Kemaslahatan *stakeholders*, khususnya pihak eksternal bank syariah, menjadi poin penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini juga selaras dengan tujuan diturunkannya syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) untuk

⁵ A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR* (Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009), 109-118.

⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 191.

science untuk mengembangkan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM) untuk mengukur kinerja bank syariah.¹⁵

Gambar 4.2.
Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)



Namun sayangnya, konstruksi MPEM yang dibuat oleh Mohammed, et al, tersebut tidak disertai dengan penjelasan dan *reasoning* yang memadai ketika membreakdown konsep *maqāsid al-sharī'ah* yang digunakan, sehingga ada beberapa derivasi rasio yang nampak bias dan cenderung tumpang tindih. Rasio *Musharakah-Mudharah* (MM *ratio*), contohnya, merupakan turunan yang dikembangkan dari *freedom of faith* (kebebasan beragama). Padahal kalau dicermati dan dianalisis, rasio MM tidak hanya merefleksikan *freedom*

¹⁵ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique & Rafikul Islam, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāsid-Based Model," *Intellectual Discourse*, Vol. 23, Special Issue (2015).

nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*); 2) menjaga esensi manusia (*ḥifẓ al-dhāt al-insāniyyah*); 3) menjaga sistem sosial masyarakat (*ḥifẓ al-mujtama‘*); dan 4) menjaga dimensi material kehidupan (*ḥifẓ al-muḥīt al-māddī*).

Secara detail, berikut konstruksi sistem penilaian kinerja bank syariah menggunakan pendekatan *maqāṣid* al-Najjār.

1. Menjaga nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*)

Pilar pertama dalam *maqāṣid* al-Najjār adalah menjaga nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*). Manusia dalam kehidupan di dunia ini telah ditunjuk menjadi khalifah (wakil) Allah untuk menjaga kelestarian kehidupan dunia. Kelestarian kehidupan tersebut bisa terwujud jika manusia mampu merealisasikan dan mengejawantahkan nilai kehidupan manusia, baik bersifat vertikal maupun horisontal. Menurut al-Najjār,¹⁶ dua dimensi penting untuk melestarikan nilai kehidupan manusia adalah melalui menjaga agama dan menjaga humanitas manusia.

Menjaga agama merupakan dimensi utama dalam kajian *maqāṣid al-sharī‘ah*. Nilai kehidupan manusia dapat tercipta dan terjaga melalui peran agama. Menurut al-Najjār,¹⁷ menjaga agama bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu memenuhi faktor-faktor penunjang keberadaan dan peran agama dan menyingkirkan faktor-faktor penghambatnya.

¹⁶ ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab‘ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 59-61.

¹⁷ *Ibid.*, 66-83.

Terkait dengan dimensi pertama ini, implementasi dimensi menjaga agama dalam penilaian kinerja bank syariah bisa dilakukan dengan menilai kepatuhan syariah (*shariah compliance*) bank syariah. Secara praktis, memenuhi faktor-faktor penunjang keberadaan dan peran agama dan menyingkirkan faktor-faktor penghambatnya bisa terwujud jika operasional bank syariah sesuai dan patuh dengan ketentuan syariah. Operasional perbankan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Penerapan *shariah compliance* itu merupakan suatu keniscayaan. Di samping untuk menjaga keselarasan praktik operasional bank syariah dengan prinsip dan aturan syariah, *shariah compliance* juga bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Shariah compliance saat ini memang masih menjadi isu krusial bagi perbankan syariah. Masyarakat masih banyak yang berasumsi bahwa bank syariah masih mengikuti bank konvensional, baik dari sisi produk, sumber daya manusia ataupun operasionalnya. Sebagian masyarakat masih berpersepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.¹⁸ Artinya, ada persoalan *shariah compliance* yang belum terpenuhi menurut persepsi masyarakat.

Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan nilai tambah yang mereka harapkan dari bank syariah.

¹⁸ <https://finance.detik.com/moneter/d-3894171/bank-syariah-disebut-riba-ini-kata-ustaz-yusuf-mansur> (16 Januari 2019); <http://www.nu.or.id/post/read/59109/pbnu-bank-berlabel-lldquosyariahrdquo-di-indonesia-belum-syarrrsquo> (16 Januari 2019); <https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam> (16 Januari 2019).

Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap keputusan dan loyalitas masyarakat dalam memilih bank syariah. Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya.

Dalam manajemen bank syariah, kepatuhan syariah juga merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko di perbankan syariah. Melihat pentingnya *shariah compliance* tersebut, Islamic Financial Service Board (IFSB) telah menetapkan standar internasional kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dalam standar IFSB tersebut kepatuhan syariah menjadi bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Di Indonesia, pedoman operasional prinsip syariah diatur melalui Fatwa DSN-MUI.¹⁹ Sementara, untuk menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah telah dibentuk dewan syariah yang bertugas mengawasi praktik operasional bank syariah. Dewan syariah tersebut dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Penilaian kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada perbankan syariah termasuk kategori penilaian Kinerja Sosial (KS) bank syariah. Kepatuhan syariah terkait dengan tiga prinsip dasar operasional

¹⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Tugas DSN-MUI di antaranya adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. Sampai tahun 2018, DSN-MUI telah mengeluarkan 122 fatwa. Fatwa terbaru adalah Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah. Lihat <https://dsnmu.or.id>

jiwa melalui *tazkiyah* (penyucian jiwa). Penyucian jiwa merupakan salah satu cara yang bersifat maknawi untuk memperkuat jiwa agar mampu menunaikan tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* Allah sehingga tercapai *falāh*.

Terkait dengan penilaian kinerja bank syariah, dimensi perlindungan terhadap jiwa bisa diturunkan menjadi perlindungan terhadap karyawan dan nasabah. Memberikan perlindungan kepada karyawan dan nasabah berarti manajemen bank syariah telah memberikan perlindungan terhadap jiwa yang menjadi salah satu pilar dalam *maqāsid al-sharī'ah*.

Karyawan dan nasabah merupakan elemen vital dalam operasional bank syariah. Karyawan di satu sisi merupakan pihak yang bertugas menjalankan roda aktivitas bank syariah, sementara nasabah di sisi lain merupakan pihak pengguna layanan perbankan syariah. Dua elemen penting ini harus mendapatkan perhatian penuh dan mendapatkan perlindungan yang selengkap mungkin.

Perlindungan karyawan atau pegawai bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis dan sinergis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.²³ Dalam sebuah perusahaan, karyawan atau pegawai sering kali terabaikan perlindungannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja

²³ Di Indonesia, perlindungan karyawan diatur melalui UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 86 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar karyawan dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraannya.²⁴

Selain perlindungan karyawan, pihak lain yang harus mendapat perhatian dan dilindungi oleh bank syariah adalah nasabah. Nasabah merupakan pengguna jasa yang ditawarkan bank syariah, baik sebagai nasabah pemilik dana pihak ketiga, sebagai nasabah penerima penyaluran dana bank, ataupun sebagai nasabah pengguna jasa lainnya yang ditawarkan oleh bank syariah. Sebagai pengguna jasa, nasabah termasuk dalam kategori konsumen bank syariah yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sudah seharusnya manajemen bank syariah memosisikan nasabah sebagai mitra dalam bisnis, bukan sebagai obyek yang selalu diperas dan dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak. Sebagai bentuk nyata perlindungan manajemen bank syariah terhadap nasabah adalah adanya penjaminan terhadap dana nasabah melalui asuransi. Di Indonesia, penjaminan terhadap dana nasabah ini dilakukan melalui jaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau perusahaan asuransi.

²⁴ Perlindungan karyawan dapat dibagi menjadi tiga macam perlindungan, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Perlindungan ekonomis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan jaminan kepada karyawan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya. perlindungan sosial adalah suatu perlindungan yang terkait dengan usaha kemasyarakatan yang mawadahi karyawan untuk ikut bersosialisasi dan berinteraksi secara sosial sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota keluarga. Perlindungan ini biasa disebut dengan jaminan kesehatan kerja. Sementara, perlindungan teknis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan jaminan keselamatan kerja. Lihat Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 61; Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 97.

Di Indonesia, jaminan perlindungan konsumen diatur melalui UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.²⁵ Selanjutnya, terkait dengan perbankan syariah, perlindungan konsumen secara spesifik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.²⁶ Menurut OJK, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hasil nyata yang diharapkan antara lain pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

²⁵ Dalam UU tersebut disebutkan bahwa konsumen memiliki hak-hak antara lain: a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lihat Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

maqāṣid al-sharī'ah. Menjaga nalar dari dimensi materi artinya nalar yang secara materi terwujud dalam bentuk otak harus mendapatkan perlindungan sehingga bisa berkembang sesuai dengan fungsinya, mulai dari nutrisi yang sehat untuk menunjang kesehatan otak serta menghindari segala hal yang merusak otak, seperti miras, narkoba, dan lain sebagainya.

Sementara, menjaga nalar secara maknawi artinya menjaga nalar manusia agar berkembang dan mampu untuk berpikir secara logis atas segala tindakannya. Cara untuk menjaga nalar secara maknawi di antaranya adalah dengan memberikan kebebasan berpikir logis, memberikan pendidikan dan pengembangan daya nalar, baik secara kognitif, psikomotorik, maupun metodologis.

Terkait dengan penilaian kinerja bank syariah, implementasi menjaga nalar adalah melalui pelatihan dan pendidikan karyawan sebagai SDM perusahaan serta melalui riset/penelitian. Dua bentuk kegiatan tersebut sangat penting dalam mengembangkan daya nalar karyawan bank syariah sekaligus sebagai bentuk perlindungan manajemen bank syariah terhadap nalar. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang sangat berharga, bahkan tak ternilai harganya. SDM bank syariah terdiri dari semua karyawan yang bekerja dalam menjalankan organisasi perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat vital dalam menjalankan operasional bank syariah untuk tercapainya tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan bank syariah serta

kemampuannya untuk berdaya saing dan kompetitif sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya.

Untuk mencetak dan menghasilkan SDM yang berkualitas, manajemen bank syariah harus terus mengembangkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme para karyawannya.²⁸ Salah satu langkah yang harus dilakukan manajemen dalam menghasilkan dan mengembangkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme adalah melalui training atau pelatihan sumber daya manusia.²⁹ Melalui training atau pelatihan, karyawan bisa mengembangkan kompetensinya, menguasai keahlian baru, membuat inovasi-inovasi baru meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan etos kerja.

Pelatihan merupakan proses untuk memperkuat atau meningkatkan skill karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Pelatihan berguna untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan membantu meningkatkan efektifitas serta produktifitas dalam perusahaan. Training atau pelatihan merupakan bentuk pemberian dorongan kepada karyawan untuk lebih meningkatkan kompetensi yang lebih baik.

²⁸ Burhanuddin Yusuf, "Human Resources Development of Sharia Banking: Phenomenological Approach," *Al-Iqtishad*, Vol. 7, No. 2 (Juli 2015), 244.

²⁹ Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM bank syariah agar perusahaan bisa lebih bersaing dan kompetitif. Lihat Ziad Mohammad Obeidat, "Human Capital Investment And Training In Islamic Banking Industry In Jordan," *European Scientific Journal*, Vol.12, No.10 (April 2016); Abdel Wadoud Moustafa Moursi El-Seoudi, et. al., "Human Resources in the Islamic Banks," *Journal of Economic Theory*, Vol. 6, No. 2 (2012); Nurul Bariah, et al., "The Determinants Of Islamic Banking Human Resource Performance: Bank Syariah Mandiri Indonesia," *International Journal of Information Technology and Business Management*, Vol. 40, No. 1 (Agustus 2015).

jaminan nutrisi yang cukup serta pendidikan jiwa, akhlak dan nalar yang memadai.

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah memberikan beasiswa pendidikan. Generasi muda merupakan aset yang sangat berharga bagi keberlanjutan umat manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan adalah menjaga kualitas generasi muda melalui dukungan beasiswa pendidikan.

Pendidikan merupakan proses vital bagi manusia. Dikatakan vital karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia. Dengan pendidikan, manusia akan mempunyai kompetensi dan karakter. Kompetensi dan karakter merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas, baik fisik maupun mental.

Dalam Islam sendiri, pendidikan memiliki makna penting. Bahkan, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Dalam arti yang luas, perintah membaca tersebut termasuk di dalamnya adalah mengkaji, memahami, melakukan observasi terhadap ayat-ayat *qawliyyah* dan *kawniyyah*, serta melakukan proses pembelajaran dan proses pendidikan. Bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan titik awal dari misi kewahyuan.

Menurut ‘Aṭīyyah al-Ibrāshī,³³ tujuan pendidikan Islam memiliki lima macam tujuan antara lain: 1) Untuk membentuk akhlak yang mulia; 2) sebagai bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat; 3) mengembangkan dan mendidik segala kompetensi pribadi manusia serta potensinya; 4) menumbuhkan ruh ilmiah (*scientific spirit*); serta 5) menggali skill dan kompetensi untuk bekal menguasai profesi tertentu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan Islam itu tidak lain adalah keseluruhan dari proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap manusia, sejak dari proses penciptaan serta pertumbuhan dan perkembangannya secara berangsur-angsur sampai sempurna dalam pelaksanaan tugas kekhalfahan. Selanjutnya atas dasar tugas kekhalfahan tersebut, manusia bertanggung jawab untuk merealisasikan proses kependidikan Islam tersebut. Oleh karena itu, setiap orang tua atau masyarakat bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak atau generasi berikutnya, membimbing dan mengarahkannya agar mereka mampu mewarisi dan mengembangkan tugas kekhalfahan secara berkesinambungan.

Meskipun pendidikan menjadi bagian vital yang wajib didapatkan oleh setiap individu, namun kenyataannya tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena berbagai faktor. Di antaranya adalah karena permasalahan ekonomi. Untuk membuka akses terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan, beasiswa bisa menjadi

³³ Muḥammad ‘Aṭīyyah al-Abrāshī, *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Falāsifatuhā* (t.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1976), 22-24.

- Memberikan pegangan kepada masyarakat tentang sistem pengendalian sosial (*social control*).

Di samping itu, hal penting yang harus dijaga kelestariannya dalam struktur sosial masyarakat adalah relasi yang ada di dalamnya. Dalam masyarakat terdapat banyak relasi yang saling terkait, mulai dari relasi antar individu, relasi antara individu dengan struktur masyarakat, relasi antara individu dengan pemerintah, serta relasi antara individu dengan organisasi masyarakat. Menjaga relasi sosial artinya menjaga berbagai macam relasi dalam masyarakat berdasarkan prinsip persaudaraan (tenggang rasa), prinsip keadilan, serta prinsip tolong menolong dan saling membantu.

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah melalui dana sosial bank syariah yang disalurkan untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). Besaran dana CSR bank syariah merefleksikan seberapa besar perhatian dan kepedulian bank syariah terhadap masyarakat sekitar. Dalam dimensi yang lebih luas, CSR bank syariah menunjukkan perlindungan bank syariah terhadap struktur sosial masyarakat dan relasi sosial.

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau

dunia. Oleh karena itu, Islam melarang semua aktifitas yang bisa merusak harta atau menyia-nyiakannya. Konsumerisme, boros, dan bermewah-mewahan termasuk budaya yang dikecam oleh Islam. Semua aktifitas tersebut termasuk kategori menyia-nyaiakan harta yang sebenarnya berdampak negatif, secara personal maupun sosial. Meskipun budaya konsumerisme telah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) banyak orang karena memang pemasaran begitu gencar serta iklan-iklan sangat persuasif di berbagai media, namun hal itu sangatlah bertentangan dengan prinsip Islam sekaligus berseberangan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*). Al-Qur'an secara tegas melarang *tabdhīr* dan *isrāf*.

3) Perlindungan terhadap hak kepemilikan.

Dalam Islam, harta dan hak kepemilikan mendapatkan perlindungan secara hukum. Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan harta orang lain. Selain itu, Islam juga melarang seseorang memakan harta sesamanya dengan cara haram, seperti riba, judi, suap dan berbagai aktivitas sejenis yang bersifat manipulatif serta berbagai macam aktivitas yang mengarah kepada timbulnya permusuhan. Dalam Islam, setiap kejahatan terhadap harta orang lain (*ta'addī 'alā al-milkiyyah*) diberikan balasan yang setimpal. Islam sangat melarang tindakan pencurian, perampokan ataupun perampasan.

Berkelanjutan, *Millennium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs), Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pembangunan Berbasis Komunitas, dan lain sebagainya. Semua itu muncul karena rasa keprihatinan banyak pihak, terutama para penggiat lingkungan, terhadap kerusakan alam yang terjadi di berbagai belahan dunia serta upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Kelestarian alam juga menjadi salah satu pilar utama dalam kajian tanggung jawab sosial organisasi yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di samping memperhatikan laba (*profit*) dan kesejahteraan manusia (*people*), organisasi atau perusahaan dewasa ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan *triple bottom lines* dalam CSR. Berdasarkan pada urgensi dan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan bagi manusia, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi salah satu isu pokok dalam ISO 26000 tentang standar pedoman tanggung jawab sosial institusi.

Implementasi dimensi ini dalam penilaian kinerja bank syariah adalah melalui CSR lingkungan (*environment responsibility*). Konsep yang mendasari tema ini adalah *mīzān*, *i'tidāl*, *khilāfah*, dan akhirat. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya

termasuk lingkungan untuk manusia agar dikelola tanpa harus merusaknya.

CSR merupakan salah satu pilar dari etika bisnis. Pengertian etika bisnis sendiri adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sedangkan etika bisnis dalam Islam adalah suatu perilaku yang baik dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang jauh dari keserakahan dan egoisme.

Selain menekankan pada kepentingan sosial masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR ini pada lingkungan. Lingkungan serta pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran dari Islam. Yang mendasari terbentuknya filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistic oleh Rasulullah SAW adalah keyakinan bahwa makhluk pada dasarnya memiliki sifat ketergantungan terhadap makhluk lain. Sifat ketergantungan antara sesama makhluk hidup ini merupakan fitrah dari Allah SWT . Allah menciptakan alam semesta ini secara seimbang dan terukur, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga apabila manusia merusak alam semesta ini ataupun mengabaikan alam semesta ini maka konsekuensinya alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang berdampak pada penderitaan manusia pula.

syariah. Hal ini karena konsep CSR yang menjadi dasar penilaian kinerja sosial cukup variatif. Sampai saat ini belum ada peneliti yang secara spesifik mengembangkan penilaian kinerja sosial bank syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menilai kinerja sosial bank syariah mengadaptasi konsep CSP yang dikembangkan untuk penilaian perusahaan secara umum. Di antara konsep CSP yang diadaptasi tersebut adalah sistem penilaian kinerja bank syariah menggunakan *Islamic Social Reporting (ISR) Index*. Selain itu, ada juga sistem penilaian kinerja sosial bank syariah yang terintegrasi dengan penilaian kinerja finansial bank syariah, seperti Model ANGELS yang dikembangkan oleh Triyuwono. Secara umum, titik persamaan antara ISR dan ANGELS, meskipun masing-masing mengungkapkannya dengan terma yang berbeda, adalah pentingnya penilaian kinerja sosial bank syariah berdasarkan tiga relasi bank syariah, yaitu relasi bank syariah dengan Tuhan, relasi bank syariah dengan *stakeholders*, dan relasi bank syariah dengan alam. Tiga relasi tersebut menjadi poin penting wujud akuntabilitas sosial bank syariah yang harus dinilai. Dalam perspektif *maqāṣid*, kinerja sosial bank syariah terkait dengan perlindungan kemaslahatan *stakeholders*, yaitu pihak eksternal bank syariah.

3. Sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dalam perspektif *maqāṣid* al-Najjār mencakup dimensi-dimensi berikut:
 - a. Menjaga nilai kehidupan manusia. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga agama yang implementasinya dalam penilaian kinerja bank

syariah melalui penilaian kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Sementara, penilaian terhadap menjaga humanitas manusia sebagai dimensi kedua dilakukan melalui penilaian visi, misi dan tujuan bank syariah.

- b. Menjaga esensi manusia. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga jiwa. Implementasinya adalah melalui penilaian perlindungan terhadap karyawan dan nasabah. Sementara dimensi kedua adalah menjaga nalar yang bisa dilakukan melalui penilaian terhadap pelatihan dan pendidikan karyawan serta melalui penelitian atau riset.
- c. Menjaga sistem sosial. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga keturunan. Dalam penilaian kinerja bank syariah, penilaian dimensi ini bisa dilakukan melalui dukungan beasiswa pendidikan yang diberikan. Sementara, dimensi kedua unsur ketiga ini adalah menjaga struktur sosial masyarakat. Penilaian kinerja untuk dimensi kedua ini dilakukan melalui penilaian terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh bank syariah.
- d. Menjaga dimensi material kehidupan. Dimensi pertama unsur ini adalah menjaga harta. Implementasi penilaian kinerja bank syariah untuk dimensi pertama ini adalah melalui redistribusi pendapatan sebagai penilaian kinerja sosial, serta melalui penilaian terhadap permodalan, kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, dan sensitifitas terhadap risiko pasar sebagai penilaian kinerja finansial (KF).

- Amelia, Erika dan Astiti Chandra Aprilianti. "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 2. Oktober 2018.
- Amidi (al), 'Ali bin Muḥammad. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 3. Riyāḍ: Dār al-Ṣamī'ī, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii. *et.al.* "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1, No. 1 (2012).
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : AlvaBet, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- 'Awdah, Jassir. *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalīl li al-Mubtadi'īn*. t.t.: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1981.
- Bank Indonesia (Biro Perbankan Syariah). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI, 2002.
- Bariah, Nurul et al., "The Determinants Of Islamic Banking Human Resource Performance: Bank Syariah Mandiri Indonesia." *International Journal of Information Technology and Business Management*, Vol. 40, No. 1, Agustus 2015.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Bedoui, Houssem Eddine and Walid Mansour. "Performance and Maqāṣid al-Sharī'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement." *Science and Engineering Ethics*. Vol. 21, No. 3. Juni 2014.
- _____. "Islamic Banks Performance and Maqāṣid Sharī'ah." makalah dipresentasikan pada *the 9th Asia-Pacific Economic Association Conference*, pada 27-28 Juli 2013 di Osaka-Jepang.
- Berger, Peter L. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Budiman, Mochammad Arif. et al. "Measuring *Maqasid al-Shari'ah* at a Micro Level with Special Reference to the Preservation of Wealth." Makalah *Proceeding The First International Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System (ICOSOPP) 2015* di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 30-31 Maret 2015.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- _____. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Chapra, M. Umer *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. *Islam and Economic Development*. Islamabad: the International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993.
- _____. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985.
- Darsono, et al. *Masa depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Desy Mayang Sari. “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk Tahun 2014-2015.” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 4. Mei 2017.
- Durif, Fabien et. al., “In Search of a Green Product Definition.” *Innovative Marketing*, Volume 6, Issue 1, 2010.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. “Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders’ Perspectives.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 1, no. 2. Juni, 2008.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- El-Seoudi, Abdel Wadoud Moustafa Moursi et. al., “Human Resources in the Islamic Banks.” *Journal of Economic Theory*, Vol. 6, No. 2, 2012.
- Fāsi (al), ‘Allāl. *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. t.t.: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1993.
- Faozan, Akhmad. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal El-Jizya*, Vol. 2, No. 1, Januari –Juni 2014.
- Farook, Sayd . et al. “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks.” Vol. 2, No. 2. 2011.
- Fauzi, Hasan dan Kamil M. Idris. “The Relationship of CSR and Financial Performance: New Evidence from Indonesian Companies.” *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Fayrūz Abādī (al), Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya‘qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassasat al-Risālah, 2005.
- Fayūmī (al), Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Muqri. *al-Miṣbāh al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr li al-Rāfi‘ī*. t.t.: Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Feldman, Ron J. dan Jason Schmidt. “What are Camels and Who Should Know?” dalam <https://www.minneapolisfed.org/publications/fedgazette/what-are-camels-and-who-should-know> diakses tanggal 31 Juli 2018.
- Freeman, E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pittman Publishing, 1984.
- Ghazālī (al), Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Vol. 2. Lubnān: Dār al-Hudā, 1994.
- Giddings, Bob. *et. al.* “Environment, Economy and Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development.” *Sustainable Development*. Vol. 10, (2002).
- Ginting, Ramlan et al. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012.
- Greenberg, Michael D. *Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting and Systemic Risk*. Santa Monica: Rand Corporation, 2013.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Ḥasanīn, Fayyāḍ ‘Abd al-Mun‘im. *Bay‘ al-Murābahah fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah*. Cairo : al-Ma‘had al-‘Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1996.
- Ḥabīb, Muḥammad Bakr Ismā‘īl. *Maqāṣid al-Sharī‘ah Ta’ṣīlan wa Taf‘īlan*. t.t.: Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī, 1427 H.
- Ḥusayn, Muḥammad. “al-Tanzīr al-Maqāṣidī ‘inda al-Imām Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Ashūr fī Kitābihi Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah.” Disertasi – Universitas Aljazair, Aljazair, 2005.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hameed, Shahul, *et. al.* “Alternative Disclosure & Performance for Islamic Bank’s.” *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrān, Saud Arabia, 2004.
- Hamoud, Sami Hassan. “Progress of Islamic Banking: the Aspirations and the Realities.” *Islamic Economic Studies*, Vol. 2 No.1 (Desember 1994).
- Haniffa, Roszaini. “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective.” *Indonesian Management and Accounting Research*, Vol. 1, 2002.
- Haron, Sudin. *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997.

- Hasan, Saipullah dan Devy Andriany. *Pengantar CSR: Sejarah, Pengertian, dan Praksis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hasan, Zulkifli. "In Search of the Perceptions of the *Shari'ah* Scholars on the *Shari'ah* Governance System." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 7, No. 1, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Holsti, Ole R. *Content Analysis for Social Sciences and Humanities*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969.
- Huda Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- 'Ibādi (al), 'Abd Allāh 'Abd al-Rahīm. *Mawqif al-Shari'ah min al-Maṣārif al-Islāmiyyah al-Mu'āṣirah*. Cairo : Jāmi'at al-Azhar, tt.
- Ibn 'Ashūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Shari'ah al-Islāmiyyah*. Urdun: Dār al-Nafāis, 2001.
- Ibn Manzūr, Abū al-Faḍl Muḥammad bin Mukrim. *Lisān al-'Arab*. Vol 3. Beirut: Dār Ṣādir, t.th.
- Ibrahim, Badr El Din A. "The "Missing Links" Between Islamic Development Objectives and the Current Practice of Islamic Banking – the Experience of the Sudanese Islamic Banks (Sibs)." *Humanomics*. Vol. 22, No. 2, 2006.
- Ibrahim, Mukdad. "Measuring the Financial Performance of Islamic Banks." *Journal of Applied Finance and Banking*, Vol. 5, No. 3, 2015.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Iqbal, Zamir. "Islamic Financial System." *World Bank: Finance and Development*. Juni 1997.
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan." *Share Social Work Journal*, Vol. 6, No 2 (Desember 2016).
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Jazil, Thuba. et al., "The Perfomance Measures of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqāṣid Al-Shari'ah Approach." *Ijtihad*, Vol. 7, No. 2, 2013.
- Jundī (al), Muḥammad al-Shahḥān. *'Aqd al-Murābahah bayn al-Fiqh al-Islāmi wa al-Ta'āmul al-Maṣrafi*. Cairo : Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986.

- Kaelan. *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kara, Muslimin H. *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- _____. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- _____. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- _____. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Kasri, Irma Aulia R. dan Niki Lukviarman. "Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri." dalam *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. ed. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Jakarta: Kencana, 2009.
- Khādimī (al), Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *‘Ilm al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah*. Riyāḍ: Maktabah al-‘Ubaykān, 2001.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkins University, 1984.
- Khalifī (al), Riyāḍ Manṣūr. "al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah wa Atharuhā fī Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah." *Majallat Jāmi‘ah al-Malik ‘Abd al-‘Azīz: al-Iqtisād al-Islāmī*. Vol. 17, No. 1, 2004.
- Khan, Feisal. "How 'Islamic' is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol. 76, 2010.
- Kilānī (al), ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā‘id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī: ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Kilānī (al), ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā‘id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī: ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Kouser, Rehana dan Irum Saba. "Gauging the Financial Performance of Banking Sector Using CAMEL Model: Comparison of Conventional Bank, Mixed and Pure Islamic Bank in Pakistan." *International Research Journal of Finance and Economics*, Issues 82, 2012.
- Lahrech, Nada. *et.al.* "Transparency and Performance in Islamic Banking: Implications on Profit Distribution." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 7, No. 1, 2014.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mills, Paul S. dan John R. Presley. *Islamic Finance: Theory and Practice*. London: Macmillan Press Ltd., 1999.
- Miṣrī (al), Rafiq Yūnus. *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2012.
- Mohamad, Muslim Har Sani. et al. "Determinants of Maqāṣid al-Sharī'ah-Based Performance Measurement Practice: The Case of Malaysian Islamic Banks." *Artikel disampaikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC) 6*, 28-29 Oktober 2015 di Kuala Lumpur.
- Mohammed, Mustafa Omar. et al. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework." makalah disampaikan pada *the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)* di Putra Jaya Marroitt, 25 Juni 2008.
- _____. et. al. "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model." *Intellectual Discourse*. Vol. 23, Special Issue, 2015.
- Mu'nis, Rā'id Naṣrī Abu. "Makhāṭir al-Sum'ah wa al-Iltizām bi al-Sharī'ah fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah Dirāsah Ḥālah 'alā al-Iḥtiyāṭiyyāt fī al-Bunūk al-Markaziyyah wa Kayfiyyat Tashkīl Hay'at al-Raqābah al-Shar'īyyah." *Dirāsāt 'Ulūm al-Sharī'ah wa al-Qānūn*, Vol. 43, No. 1, 2016.
- Muḥammad, Yūsuf Kamāl. *Muṣtalaḥāt al-Fiqh al-Mālī al-Mu'āṣir : Mu'āmalāt al-Sūq*. Cairo : al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1997.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia, 2009.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Murniasih, Erny. *Buku Pintar Beasiswa*. Jakarta: GagasMedia, 2009.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Najjār (al), ‘Abd al-Majīd. *Qaḍāyā al-Bī’ah min Manẓūr Islāmi*. Doha: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 2004.
- _____, Abdul Majīd. *Maqāṣid al-Sharī’ah bi Ab’ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008.
- Naqvi, Syed Nawab Heider. *Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation, 2003.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nofrianto dan Suardi. “Bank Syariah Dan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 20, No. 2, 2015.
- Obeidat, Ziad Mohammad. “Human Capital Investment And Training In Islamic Banking Industry In Jordan.” *European Scientific Journal*, Vol.12, No.10, April 2016.
- Othman, Rohana dan Azlan Md Thani. “Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia.” *International Business & Economics Research Journal*, Vol. 9, No. 4. April 2010.
- _____, et. al., “Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari’a-Approved Companies in Bursa Malaysia.” *Research Journal of International Studies*, Issue 12, Oktober 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK, 2017.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003.
- Post, James E. et al. *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. New York: McGraw Hill, 2002.
- Prabowo, Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal. “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Issue 1, Januari 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Qal’ahji, Muḥammad Rawwās. *Mabāhith fī al-Iqtisād al-Islāmī min Uṣūlihi al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 2000.
- Qarḍāwī (al), Yūsuf. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

- Rahardjo, Dawam. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ramadhan, Muhammad Hasan. “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah.” Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.
- Rathi, RA. “Value Added Statement: a New Dimension to Accounting Communication.” *International Journal of Applied Research*, Vol. 3, No. 7, 2017.
- Raysūnī (al), Aḥmad. “al-Baḥṡ fi Maqāsid al-Sharī’ah: Nash’atuhu wa Taṭawwuruḥu wa Mustaqbaluhu.” Makalah disampaikan dalam Seminar Maqāsid al-Sharī’ah yang diselenggarakan oleh Yayasan al-Furqon di London tanggal 1-5 Maret 2005.
- _____. *Madkhal ilā Maqāsid al-Sharī’ah*. Cairo: Dār al-Kalimah, 2013.
- _____, Aḥmad. *Nazariyyat al-Maqāsid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- _____, Aḥmad. *al-Dharī’ah ilā Maqāsid al-Sharī’ah*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2016.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- _____, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- _____. et. al. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rosly, Saiful Azhar dan Mohd Afāndi Abu Bakar. “Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia.” *International Journal of Social Economics*. Vol. 30, No. 12, 2003.
- Roussakis, Emmanuel N. “Global Banking: Origins and Evolution.” *Revista de Administraçāo de Empresas*, Vol. 37, No. 4, 1997.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Şibāgh (al), ‘Abd al-Laṭīf al-Shaykh Tawfiq. “Maqāsid al-Sharī’ah wa al-Mu’āmalāt al-Iqtisādiyyah wa al-Māliyyah.” makalah disampaikan dalam Dialog Hari Rabu di Markaz Abḥāth al-Iqtisād al-Islāmī tanggal 16 Shafar 1430 H.
- Sadeli, Lili M. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Sadr, Muhammad Baqr. *An Introduction to Principles of Islamic Banking*. Tehran: Bunyad Be’thet, 1982.

- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____. *Islamic Banking and Interest*. Leiden: EJ Brill, 1996.
- Sekaran, Uma. *Research Methods for Business: a Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2003.
- Shāṭibī (al). *al-Muwāfaqāt*. vol. 2. al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Shahīd, Muḥammad. *Maqāṣid al-Sharī‘ah: fī Ishkālīyyat al-Ta‘rīf*. al-Ribāṭ: Muassasah Mu‘minun, 2015.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Sofyani, Hafiez. et al. “Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia).” *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 4, No. 1, Maret 2012.
- Su‘ūdī (al), ‘Abd al-Wadūd Muṣṭafā Mursī. “Maqāṣid al-Sharī‘ah wa Taṭbīqātuha fī al-Mu‘āmalāt al-Maṣrafiyyah al-Mu‘āṣirah.” Makalah dipresentasikan dalam *International Conference on Islamic Banking & Finance: Cross Border Practices & Litigations* di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 15-16 Juni 2010.
- Sucipto. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Medan: FE Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sulhan, M. dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Susanto, A.B. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR*. Jakarta: Esensi Group Erlangga, 2009.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Tāhīr (al), Qādiri Muḥammad, et al. *al-Maṣārīf al-Islāmiyah bayna al-Wāqi‘ wa al-Ma‘mul*. Beirut: Maktabah Ḥasan al-‘Aṣriyah, 2014.
- Tharaba, M. Fahim. *Sosiologi Agama*. Malang: Madani, 2016.
- Triuwono, Iwan. “ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 2, No. 1 (2011).
- Uha, Ismail Nawawi. *Bisnis Jasa Industri Bank Syari‘ah*. Buku 2. Jakarta: VivPress, 2015.

